



LAPORAN KINERJA

BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

PROVINSI SUMATERA SELATAN

TAHUN 2025

BPMP
Provinsi
Sumatera Selatan

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH
BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KATA PENGANTAR



Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah swt., Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat-Nya Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Sumatera Selatan berhasil menyelesaikan penyusunan laporan kinerja tahun 2025 dengan tepat waktu. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan bahwa setiap instansi pemerintah harus menyusun laporan kinerja setiap tahun.

Laporan ini menyajikan informasi kinerja atas pencapaian sasaran strategis/program kegiatan beserta indikator kerjanya sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja BPMP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025. BPMP Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2025 menetapkan dua sasaran dan empat indikator kinerja kegiatan. Secara umum, BPMP Provinsi Sumatera Selatan telah berhasil merealisasikan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tersebut.

Meskipun telah banyak capaian keberhasilan, namun masih banyak permasalahan yang perlu diselesaikan di tahun mendatang. Permasalahan tersebut di antaranya masih perlu peningkatan strategi dan inovasi dalam pencapaian kinerja sesuai dengan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis BPMP Provinsi Sumatera Selatan ke depan. Dengan dukungan dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, diharapkan permasalahan yang dihadapi tersebut dapat segera terselesaikan.

Laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran objektif tentang kinerja yang dicapai BPMP Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2025. Semoga laporan kinerja ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi perencanaan program/kegiatan dan anggaran, perumusan kebijakan bidang pendidikan dan kebudayaan, serta peningkatan kinerja di tahun mendatang.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan laporan kinerja ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberkahi setiap ikhtiar dan upaya kita dalam membangun dunia pendidikan.

Indralaya, 30 Januari 2026
Kepala BPMP Provinsi Sumatera Selatan,



H. Tajuddin Idris, S.Si, M.T.
NIP. 197203302002121002

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja BPMP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 disusun berdasarkan capaian 2 sasaran kegiatan (SK) dengan 4 indikator kinerja kegiatan (IKK) sebagaimana tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Kepala BPMP Provinsi Sumatera Selatan dan Dirjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen. Tingkat ketercapaian SK 1 dan 2 dan IKK 1.1, 1.2, 2.1, dan 2.2 secara komprehensif diuraikan pada tabel berikut.

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Persentase Capaian Kinerja
SK 1. Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen	IKK 1.1. Persentase satuan pendidikan yang memanfaatkan hasil asesmen tingkat nasional untuk peningkatan kualitas pembelajaran	64,06	77,23	120,56%
	IKK 1.2. Persentase daerah (provinsi dan kabupaten/kota) yang memenuhi SPM pendidikan	57,61	50	86,79%
SK 2. Meningkatnya tata kelola BPMP Provinsi Sumatera Selatan	IKK 2.1. Capaian Nilai Kinerja Anggaran BPMP Provinsi Sumatera Selatan dengan kategori sangat baik	Sangat Baik	Sangat Baik	100,00%
	IKK 2.2. Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BPMP Provinsi Sumatera Selatan minimal A	A	A	100,00%
Total Capaian PK				407,35%
Nilai Kinerja Organisasi (NKO) atau Rata-rata Capaian PK				101,84%
Predikat Penilaian Kinerja Organisasi				Istimewa

Secara umum, capaian kinerja BPMP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 sebagai berikut.



Kendala dan tantangan yang ditemui dalam upaya pencapaian target kinerja BPMP Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut.

1. Adanya anomali dan integritas data berupa ketimpangan antara data administratif dengan realitas kualitas, misalnya anomali data pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik) di satuan pendidikan dan ketimpangan data capaian Akreditasi Sekolah dengan validasi yang tersaji dalam Rapor Pendidikan.
2. Kesenjangan kompetensi SDM Digital berupa belum meratanya kemampuan guru dan tenaga kependidikan dalam memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung layanan mutu.
3. Keterbatasan sumber daya sehingga pemenuhan Standar Nasional Pendidikan menjadi terhambat.
4. Kapasitas Fiskal dan Penurunan Transfer ke Daerah (TKD) berdampak langsung pada perencanaan anggaran pendidikan di daerah yang berkontribusi terhadap alokasi program peningkatan mutu sebagai prioritas utama dibandingkan pembangunan fisik dan beban administratif yang tinggi.
5. Lemahnya sinergi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti penanganan isu Anak Tidak Sekolah (ATS) memerlukan data dari Dinas Kependudukan (Disdukcapil) dan intervensi dari Dinas Sosial.
6. Tantangan geografis dan disparitas wilayah, dimana Provinsi Sumatera Selatan memiliki karakteristik wilayah yang luas dengan medan perairan dan pegunungan. Hal ini menyebabkan biaya logistik dan pengawasan untuk menjangkau 17 Kabupaten/Kota menjadi sangat tinggi yang menyebabkan intervensi mutu tidak selalu merata.
7. Masih terbatasnya sinergi dengan mitra eksternal (NGO, Perguruan Tinggi, dan Sektor Swasta) untuk ikut serta dalam pendampingan satuan pendidikan. Beban pendampingan saat ini masih sangat bertumpu pada personil BPMP dan pengawas sekolah yang jumlahnya terbatas.
8. Perubahan regulasi yang dinamis terkait penjaminan mutu seringkali memerlukan waktu sosialisasi yang lama hingga ke tingkat satuan pendidikan, menyebabkan jeda (*gap*) dalam implementasi kebijakan di lapangan.

Langkah antisipasi yang dilaksanakan BPMP Provinsi Sumatera Selatan dalam upaya pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut.

1. Melakukan strategi penguatan tata kelola data melalui layanan konsultasi intensif (daring maupun luring) bagi operator sekolah dan kepala sekolah untuk melakukan validasi silang (*cross-check*) data Dapodik.
2. Melakukan verifikasi lapangan pada sampel sekolah yang menunjukkan anomali data yang ekstrem (misalnya, nilai sarpras tinggi namun kondisi fisik rusak) guna memastikan akurasi data administratif dan data faktual.
3. Menyelenggarakan pertemuan rutin dengan Bagian Perencanaan Dinas Pendidikan, Bappeda dan BPKAD untuk menyajikan profil pendidikan daerah dan memastikan indikator SPM masuk ke dalam Dokumen Perencanaan Daerah (RPJMD, Renstra, RKPD dan Rencana Kerja).
4. Menginisiasi forum koordinasi yang melibatkan Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, dan Disdukcapil untuk penanganan isu spesifik seperti Anak Tidak Sekolah (ATS), *Stunting*, dan

PAUD-HI yang menjadi salah satu indikator utama SPM.

5. Optimalisasi pendamping satuan pendidikan sebagai "*Co-Fasilitator*" yang dilatih secara khusus untuk menjadi mitra operasional BPMP dalam mengawal kebijakan prioritas di tingkat satuan pendidikan.
6. Mengembangkan sistem informasi internal yang dapat memantau progres pemenuhan SNP dan SPM di seluruh wilayah Sumsel, misalnya melalui Dasbor Lintasan Musi dan Dasbor Kualitas Dapodik Provinsi Sumatera Selatan, yang juga dimanfaatkan seluruh pemangku kepentingan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGANTAR	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum.....	1
B. Dasar Hukum.....	3
C. Tugas, Fungsi, serta Struktur Organisasi	5
D. Isu Strategis/Permasalahan	7
E. Peran Strategis.....	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	11
A. Sasaran Kegiatan.....	11
B. Program Prioritas	13
C. Rencana Kerja dan Anggaran.....	30
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	322
A. Capaian Kinerja	32
B. Capaian Anggaran	51
C. Kinerja Lain-Lain	52
BAB IV PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Kendala dan Tantangan	70

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Pegawai BPMP Provinsi Sumatera Selatan	2
Tabel 2.1	Matriks Kinerja BPMP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029	12
Tabel 2.2	Program Prioritas BPMP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025	25
Tabel 2.3	Rencana Kerja dan Anggaran BPMP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025	30
Tabel 3.1	Pengukuran Kinerja BPMP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025	32
Tabel 3.2	Perbandingan Target dan Realisasi Tahun Berjalan dengan Target Renstra	33
Tabel 3.3	Hasil IKK 1.2 BPMP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025	38
Tabel 3.4	Target dan Realisasi Indikator Program Prioritas Tahun 2025	39
Tabel 3.5	Target, Realisasi dan Capaian Kinerja IKK 2.1 BPMP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025	47
Tabel 3.6	Predikat dan Interpretasi Nilai SAKIP	47
Tabel 3.7	Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja IKK 2.2 BPMP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025.....	48
Tabel 3.8	Realisasi Anggaran BPMP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025	51
Tabel 3.9	Piagam Penghargaan BPMP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025	62
Tabel 3.10	Program Crosscutting/Collaborative BPMP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025	63

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi BPMP Provinsi Sumatera Selatan	6
Gambar 1.2	Struktur Kerja BPMP Provinsi Sumatera Selatan	7
Gambar 2.1	Struktur Tim Kerja Revitalisasi	14
Gambar 3.1	Target Kinerja Sasaran Kegiatan 1 BPMP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025	34
Gambar 3.2	Perhitungan Satuan Pendidikan yang Memanfaatkan Hasil Asesmen Tingkat Nasional untuk Upaya Peningkatan Kualitas Pembelajaran.....	36
Gambar 3.3	Target dan Realisasi Kinerja IKK 1.1 BPMP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025	36
Gambar 3.4	Target dan Realisasi Kinerja IKK 1.2 BPMP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025	39
Gambar 3.5	Inovasi Pendukung Pelayanan Prima dan Pencapaian Kinerja Utama ...	54



A. Gambaran Umum

Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Sumatera Selatan merupakan satuan kerja/unit pelaksana teknis di bawah pembinaan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP).

Pada awal berdirinya, BPMP Provinsi Sumatera Selatan dikenal dengan nama Balai Penataran Guru (BPG) Palembang. BPG Palembang mulai beroperasi pada tanggal 21 Januari 1984 dan diresmikan pada tanggal 3 Februari 1987 oleh Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Depdikbud) Republik Indonesia, Bambang Triantoro. Dalam perkembangannya, BPG Palembang mengalami beberapa kali perubahan baik terkait nomenklatur maupun tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan. Perubahan nomenklatur pertama, BPG Palembang berubah menjadi Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan sesuai Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 087/O/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan. Selanjutnya pada tahun 2007 dilakukan perubahan untuk kedua kali dari Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan menjadi Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 7 tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan. Dengan demikian, sejak tahun 2007 nomenklatur lembaga ini menjadi Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Sumatera Selatan. Perubahan ini diperkuat dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37 tahun 2012 yang kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan. Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan, nomenklatur Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan berubah menjadi Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP).

Dinamika regulasi terakhir yaitu berdasar Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP), Lembaga

Penjaminan Mutu Pendidikan berubah nomenklatur menjadi Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP).

Sejak November 2025 BPMP Provinsi Sumatera Selatan dipimpin oleh Tajuddin Idris, S.Si., M.T. BPMP Provinsi Sumatera Selatan mempunyai cakupan wilayah kerja yaitu Provinsi Sumatera Selatan dan 17 kabupaten/kota se-Sumatera Selatan.

Secara keseluruhan jumlah pegawai BPMP Provinsi Sumatera Selatan per Desember 2025 yaitu sebanyak 104 orang. Komposisi pegawai ini terdiri atas 100 orang Aparatur Sipil Negara (70 ASN-PNS dan 30 ASN-PPPK) dan 4 orang Non ASN, seperti tersaji pada Tabel 1.1 berikut.

Tabel 1.1 Data Pegawai BPMP Provinsi Sumatera Selatan

Kadaan	Jumlah	Keterangan
Status Kepegawaian:		
PNS	70 orang	
PPPK	30 orang	
Non ASN	4 orang	
PNS berdasarkan Status Jabatan:		
Pimpinan Eselon III	1 orang	
Pimpinan Eselon IV	1 orang	
Jabatan Pelaksana	75 orang	
Jabatan Fungsional	23 orang	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 18 Widyaprada ▪ 1 Perawat ▪ 1 Pustakawan ▪ 1 Pranata Komputer ▪ 1 Analis SDM Aparatur ▪ 1 Penata Laksana Barang
PNS berdasarkan Status Pendidikan:		
Doktor/S3	3 orang	
Magister/S2	26 orang	
Sarjana/S1	29 orang	
Sarjana Muda/Diploma	3 orang	
SMA	9 orang	
Jumlah	70 orang	
PNS berdasarkan Status Kepangkatan:		
Golongan IV	27 orang	
Golongan III	36 orang	
Golongan II	6 orang	
Golongan I	1 orang	

Keadaan	Jumlah	Keterangan
Jumlah	70 orang	
PNS berdasarkan Jenis Kelamin:		
Laki-laki	46 orang	
Perempuan	24 orang	
Jumlah	70 orang	
PPPK berdasarkan Status Pendidikan:		
Sarjana/S1	4 orang	
Sarjana Muda/Diploma	1 orang	
SMA	24 orang	
SD	1 orang	
Sarjana/S1	4 orang	
Jumlah	30 orang	
PPPK berdasarkan Status Kepangkatan:		
Kelas 7	4 orang	
Kelas 6	1 orang	
Kelas 5	24 orang	
Kelas 1	1 orang	
Jumlah	30 orang	
PPPK berdasarkan jenis kelamin		
Laki-laki	23 orang	
Perempuan	7 orang	
Jumlah	30 orang	
Non ASN berdasarkan Status Pendidikan		
Sarjana/S1	3 orang	
SMA	1 orang	
Jumlah	4 orang	
Non ASN berdasarkan Jenis Kelamin		
Laki-laki	1 Orang	
Perempuan	3 Orang	
Jumlah	4 Orang	

Sumber: Data Kepegawaian BPMP Provinsi Sumatera Selatan, Desember 2025



B. Dasar Hukum

Dasar hukum yang menjadi acuan dalam penyusunan laporan kinerja sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;
 6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 7. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjurangan Kinerja Instansi Pemerintah;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 11 tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan;
 12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 13. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1050).



C. Tugas dan Fungsi serta Struktur Organisasi

C.1. Tugas

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan, BPMP merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah. BPMP mempunyai tugas melaksanakan penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat di provinsi.

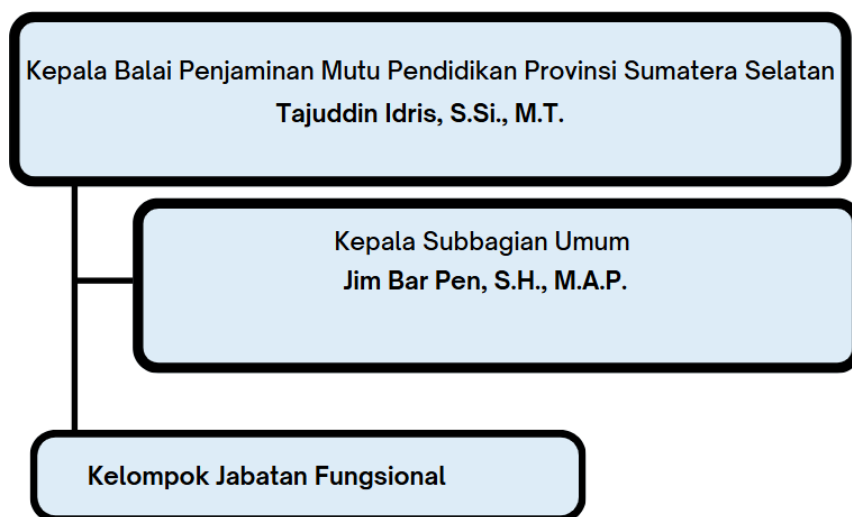
C.2 Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 11 Tahun 2022, BPMP menyelenggarakan fungsi sebagai berikut.

1. Pelaksanaan pemetaan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat;
2. Pengembangan model penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat;
3. Pelaksanaan supervisi penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat dalam penjaminan mutu pendidikan;
4. Pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat dalam penjaminan mutu pendidikan;
5. Pengembangan dan pelaksanaan kemitraan di bidang penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat;
6. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat; dan
7. Pelaksanaan urusan administrasi.

C.3 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 11 Tahun 2022, struktur organisasi BPMP terdiri atas 1 orang administrator yaitu kepala dan 1 orang pengawas yaitu Kepala Subbagian Umum serta kelompok jabatan fungsional. Struktur Organisasi BPMP Provinsi Sumatera Selatan tercantum pada Gambar 1.1 berikut.



Gambar 1.1 Struktur Organisasi BPMP Provinsi Sumatera Selatan

Selanjutnya, guna mendukung pelaksanaan tugas BPMP Provinsi Sumatera Selatan yaitu melaksanakan penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat di Provinsi Sumatera Selatan, dan untuk optimalisasi capaian kinerja organisasi serta penyelarasan dengan unit kerja direktorat jenderal, BPMP Provinsi Sumatera Selatan melakukan transformasi struktur kerja dari 5 tim kerja pada tahun 2024 menjadi 3 tim kerja pada tahun 2025 dan didukung oleh 5 sub tim kerja pada Sub Bagian Umum.

Tim kerja BPMP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 yaitu:

- a. Tim Kerja PAUD dan SD/Sederajat
- b. Tim Kerja SMP dan SMA/Sederajat
- c. Tim Kerja Program Prioritas

Pada masing-masing tim kerja ditetapkan ketua tim kerja, kasub tim kerja, dan anggota tim kerja.

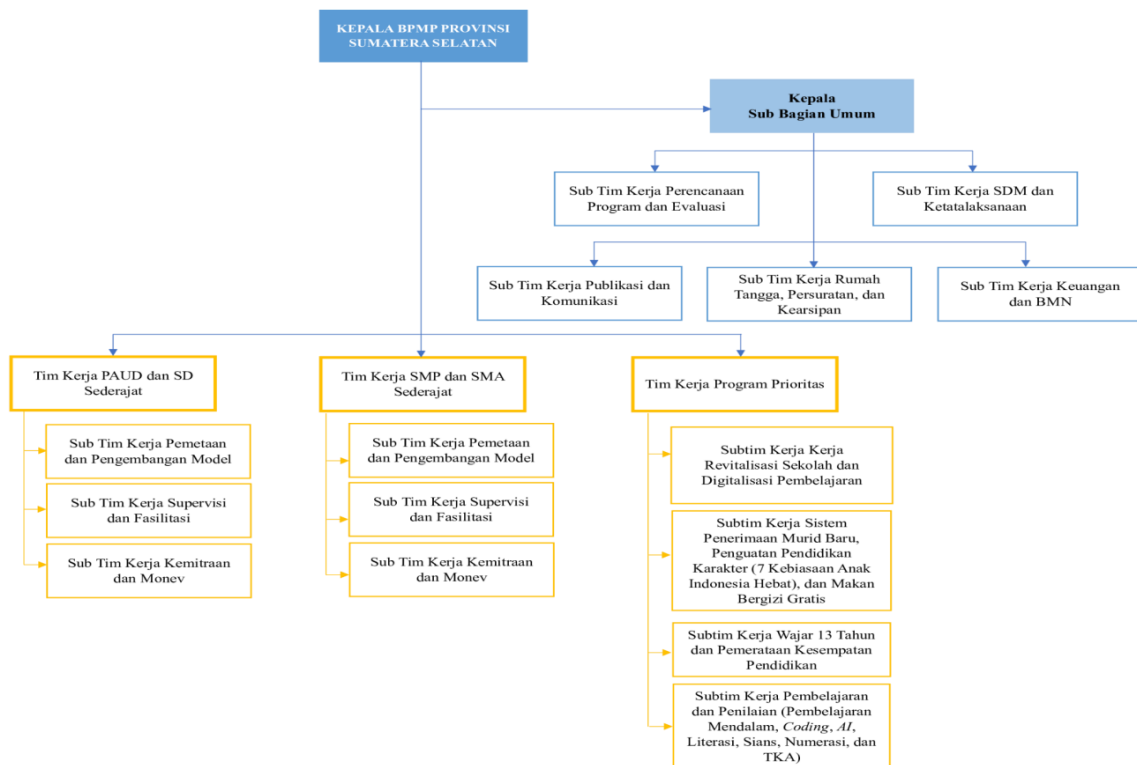
Sedangkan Sub tim kerja pada Sub Bagian Umum Tahun 2025 yaitu:

- a. Sub Tim Kerja Perencanaan Program dan Evaluasi
- b. Sub Tim Kerja Sumber Daya Manusia (SDM) dan Ketatalaksanaan
- c. Sub Tim Kerja Rumah Tangga, Persuratan dan Kearsipan

- d. Sub Tim Kerja Publikasi dan Komunikasi
- e. Sub Tim Kerja Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN)

Pada masing-masing sub tim kerja ditetapkan ketua sub tim kerja, koordinator, dan anggota tim kerja.

Struktur tim kerja BPMP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 disajikan pada gambar 1.2 berikut.



Gambar 1.2 Struktur Kerja BPMP Provinsi Sumatera Selatan

D. Isu-Isu Strategis/Permasalahan

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang berperan dalam penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan, BPMP Provinsi Sumatera Selatan dihadapkan pada berbagai tantangan dan isu strategis yang dinamis dan kompleks. Tantangan tersebut muncul seiring dengan tuntutan peningkatan mutu layanan pendidikan yang berkelanjutan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, serta pendidikan masyarakat. Adapun tantangan dan isu strategis BPMP Provinsi Sumatera Selatan dalam peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat dalam pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan antara lain sebagai berikut.

D.1 **Isu Strategis Eksternal**

Beberapa permasalahan/isu strategis eksternal yang menjadi perhatian antara lain:

1. Adanya perubahan nomenklatur dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) menjadi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) sesuai dengan Perpres 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
2. Adanya efisiensi anggaran yang mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
3. Adanya penyalarsan program prioritas dan kegiatan serta penyesuaian anggaran dengan unit utama dalam mengimplementasikan program prioritas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
4. Perubahan kebijakan dan program prioritas Kementerian Pendidikan dasar dan Menengah.
5. Penguatan sinergi dan kolaborasi partisipasi semesta/seluruh ekosistem pendidikan dalam mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua.
6. Penguatan sinergi dan kolaborasi partisipasi semesta/seluruh ekosistem pendidikan dalam mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua.
7. Sosialisasi dan Advokasi Penguatan Pendidikan Karakter melalui Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat (G7KAIH).
8. Sosialisasi dan Advokasi Program Wajib Belajar 13 Tahun bagi seluruh pemangku kepentingan dan ekosistem pendidikan.
9. Penguatan komitmen pemangku kepentingan dan satuan pendidikan dalam mendukung optimalisasi transformasi pendidikan yang fokus pada peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran yang lebih interaktif, fleksibel, dan kontekstual sesuai kebutuhan peserta didik melalui Program Digitalisasi Pembelajaran.
10. Optimalisasi implementasi Program Revitalisasi Sekolah dalam rangka penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan merata.
11. Optimalisasi pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu untuk semua melalui Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).
12. Optimalisasi penerapan dan edukasi Program Makan Bergizi Gratis dalam rangka pemenuhan gizi dan peningkatan pengetahuan gizi.
13. Optimalisasi penerapan strategi pembelajaran dan penilaian yang holistik dan reflektif serta berfokus pada proses belajar yang bermakna, kontekstual, dan berpihak pada

kebutuhan peserta didik.

14. Optimalisasi dan advokasi strategi penjaminan mutu pendidikan melalui pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan peningkatan kualitas pembelajaran serta tata kelola berbasis Rapor Pendidikan untuk mencapai standar nasional secara berkelanjutan.
15. Optimalisasi kepatuhan penggunaan dana BOS Reguler dan BOS Kinerja sesuai Juknis (Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2025).
16. Optimalisasi peran mitra, komunitas dan ekosistem pendidikan dalam mendukung implementasi program prioritas.

D.2 Isu Strategis Internal

Beberapa permasalahan/isu strategis internal yang menjadi perhatian antara lain:

1. Belum meratanya kompetensi SDM dalam memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung layanan mutu pendidikan.
2. Menguatkan komitmen budaya belajar sepanjang hayat bagi seluruh pegawai secara mandiri dalam rangka optimalisasi transformasi UPT.
3. Penguatan kapasitas SDM menekankan pada pengembangan SMART ASN yang profesional, berintegritas, wawasan global, bahasa, dan *hospitality*.
4. Penguatan strategi komunikasi dan publikasi melalui optimalisasi kanal informasi dan media sosial untuk meningkatkan jangkauan dan pemahaman serta dampak baik atas capaian kinerja BPMP Provinsi Sumatera Selatan dalam upaya strategis peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan.
5. Pembangunan zona integritas untuk mendorong reformasi birokrasi internal yang berorientasi pada pelayanan dan akuntabilitas.
6. Belum optimalnya keterbukaan informasi Publik
7. Membangun budaya kerja dalam pelayanan di dunia pendidikan yang Responsif, Akuntabel, Melayani, Adaptif, dan Harmonis (RAMAH) serta Setia, Amanah, Negarawan, Teladan, Unggul dan Ngemong (SANTUN).
8. Menguatkan komitmen seluruh pegawai untuk mendukung budaya kerja mengacu pada tata nilai atau core values ASN BerAkhlaq



E. Peran Strategis

BPMP Provinsi Sumatera Selatan memiliki peran strategis dalam:

1. Mengawal keterlaksanaan penjaminan mutu pendidikan secara sistematis, terukur, dan berkelanjutan melalui pengawalan kebijakan, program prioritas, serta pemantauan capaian mutu pendidikan di daerah.
2. Mengadvokasi pemerintah daerah (pemda) dan melakukan pendampingan serta monitoring dan evaluasi untuk memastikan implementasi kebijakan dan program prioritas Kemendikdasmen.
3. Membangun dan mengoptimalkan sinergi serta kolaborasi dengan pemerintah daerah, mitra, dan ekosistem pendidikan guna mendukung pencapaian target program prioritas secara efektif dan berkelanjutan.
4. Memanfaatkan data pendidikan sebagai dasar dalam penyusunan rekomendasi kebijakan, penguatan intervensi program, serta pengambilan keputusan berbasis bukti oleh pemangku kepentingan daerah.
5. Mendorong perubahan praktik pembelajaran, kepemimpinan sekolah, dan budaya mutu melalui pemanfaatan data, praktik baik, serta inovasi yang relevan dengan karakteristik daerah.
6. Meningkatkan kompetensi dan partisipasi aktif ASN BPMP Provinsi Sumatera Selatan dalam pencapaian kinerja organisasi.

BAB II | PERENCANAAN KINERJA

BPMP Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Unit Pelaksana Teknis Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, mengemban amanat pembangunan sumber daya manusia melalui ikhtiar bersama untuk meningkatkan mutu pendidikan. Oleh karena itu, BPMP Provinsi Sumatera Selatan menentukan visi berdasarkan visi Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen Kemendikdasmen tahun 2025-2029. Adapun Visi Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen Kemendikdasmen tahun 2025-2029 adalah **“Terwujudnya pendidikan bermutu untuk semua dengan dukungan partisipasi semesta dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”**.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, BPMP Provinsi Sumatera Selatan berkomitmen untuk melaksanakan tugas dan kewenangan dengan Responsif, Akuntabel, Melayani, Adaptif, dan Harmonis (RAMAH), serta mengedepankan profesionalitas dan integritas. Sesuai dengan kepribadian bangsa yang berlandaskan gotong royong, BPMP Provinsi Sumatera Selatan dan seluruh pemangku kepentingan terkait bekerja bersama untuk memajukan pendidikan sesuai dengan visi dan misi presiden.

Misi BPMP Provinsi Sumatera Selatan mengacu pada misi Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen yang berdasarkan misi Kemendikdasmen, yaitu:

1. Mewujudkan pendidikan yang berkeadilan, berkualitas, berdaya saing, dan relevan yang didukung dengan sarana dan prasarana memadai, sistem pembelajaran berkualitas, serta teknologi pembelajaran.
2. Mengoptimalkan kerja sama, kolaborasi, dan peran seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan.

Untuk mengawal pencapaian visi dan misi di atas, BPMP Provinsi Sumatera Selatan menetapkan moto yakni **“MELEJIT dan Melayani dengan HATI.”** Kata MELEJIT merupakan akronim yang menunjukkan nilai-nilai yang diharapkan menjadi nilai karakter dan kinerja pegawai BPMP Provinsi Sumatera Selatan, yaitu mutu, edukasi, loyal, ekspresif, juara, inovasi, dan teladan. Kata HATI juga merupakan nilai-nilai yang diharapkan menjadi budaya kerja dan pelayanan, yaitu humanis, amanah, tanpa pamrih, dan berintegritas.

A. Sasaran Kegiatan

Perumusan Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan BPMP Provinsi Sumatera Selatan ditujukan untuk menggambarkan ukuran-ukuran dukungan BPMP Provinsi Sumatera Selatan terhadap tercapainya visi dan terlaksananya misi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Sasaran kegiatan BPMP Provinsi Sumatera Selatan pada periode Renstra 2025-2029 adalah

1. Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen
2. Meningkatnya tata kelola BPMP Provinsi Sumatera Selatan

Matriks Kinerja Jangka Menengah BPMP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 menetapkan target sasaran kegiatan (SK) dan indikator kinerja kegiatan (IKK) seperti yang tersaji pada Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1 Matriks Kinerja BPMP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 – 2029

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target Kinerja					
		Satuan	2025	2026	2027	2028	2029
SK 1	Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen						
IKK 1.1	Persentase satuan pendidikan yang memanfaatkan hasil asesmen tingkat nasional untuk peningkatan kualitas pembelajaran	%	64,06	65,34	66,64	67,98	69,34
IKK 1.2	Persentase daerah (provinsi dan kabupaten/kota) yang memenuhi SPM pendidikan	%	57,61	67,75	72,64	77,72	82,61
SK 2	Meningkatnya tata kelola BPMP Provinsi Sumatera Selatan						
IKK 2.1	Capaian Nilai Kinerja Anggaran BPMP Provinsi Sumatera Selatan dengan kategori sangat baik	Kategori	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
IKK 2.2	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BPMP Provinsi Sumatera Selatan minimal A	Predikat	A	A	A	A	A

B. Program Prioritas

B.1 Satuan PAUD, Dikdas dan Dikmen yang difasilitasi penjaminan mutunya

BPMP Provinsi Sumatera Selatan sebagai UPT mendukung program prioritas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui program Revitalisasi Sekolah, Digitalisasi Pembelajaran, Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), Wajib Belajar 13 Tahun, Penguatan Pendidikan Karakter, Makan Bergizi Gratis (MBG), Pembelajaran dan Penilaian, serta Penjaminan Mutu Pendidikan. Adapun uraian lebih rinci mengenai program prioritas dimaksud sebagai berikut.

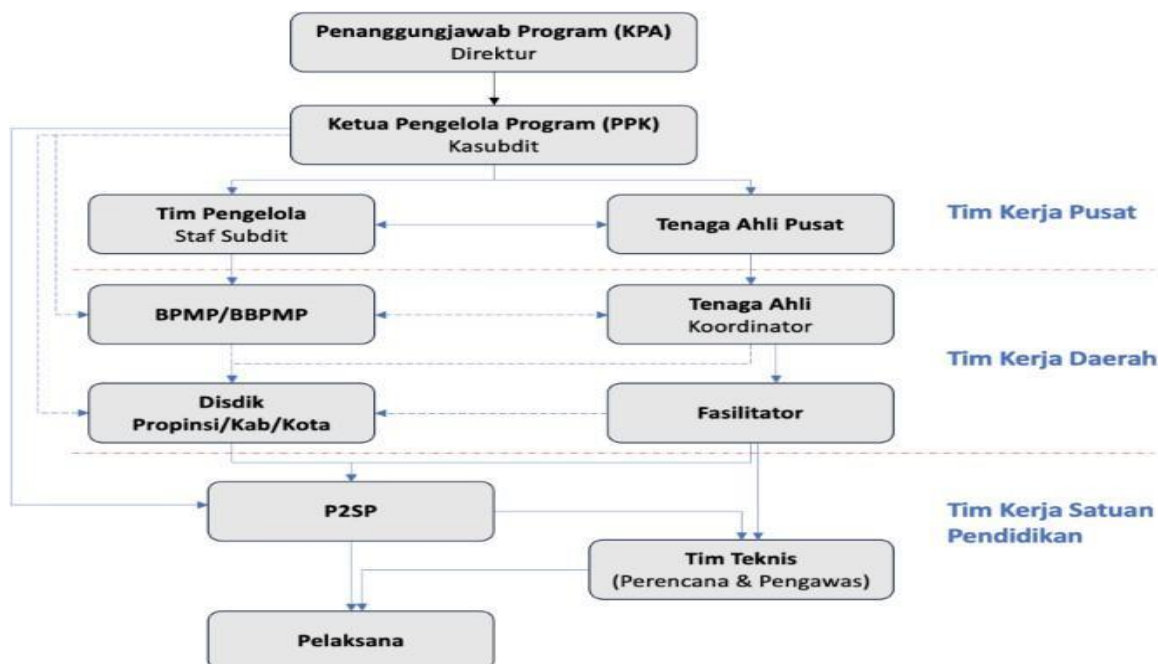
a. Revitalisasi Sekolah

Dalam rangka penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan merata, Pemerintah telah menetapkan program prioritas nasional Revitalisasi Sarana dan Prasarana Satuan Pendidikan yang berkualitas dalam rangka mewujudkan Asta Cita ke-4, yaitu memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), penguatan pendidikan berkualitas, aksesibilitas, yang inovatif dan adaptif. Revitalisasi Sarana dan Prasarana Satuan Pendidikan juga merupakan implementasi Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) membangun satuan pendidikan unggul dan revitalisasi satuan pendidikan. Berdasarkan Instruksi Presiden No. 7 Tahun 2025 tentang Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan dan Revitalisasi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah serta Digitalisasi Pembelajaran dan Pengelolaan SMA Unggul Garuda, yang menginstruksikan percepatan pembangunan sekolah, penyediaan perangkat digital (seperti Interactive Flat Panel/IFP) untuk pemerataan pembelajaran, dan pengelolaan sekolah unggul, bertujuan meningkatkan SDM melalui transformasi pendidikan digital di seluruh Indonesia. Program Revitalisasi Satuan Pendidikan adalah program peningkatan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas melalui rehabilitasi dan pembangunan prasarana, serta penyediaan sarana dengan mekanisme swakelola dalam program revitalisasi sebagai bentuk mekanisme pengelolaan revitalisasi secara mandiri oleh satuan pendidikan yang melibatkan peran serta masyarakat. Model pembangunan pendidikan dengan melibatkan peran serta masyarakat melalui pengadaan swakelola, dimana pengelolaan pendidikan dilakukan dengan prinsip Manajemen Berbasis Sekolah. Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan berdampak pada peningkatan mutu layanan pendidikan, rasa memiliki, dan tanggung jawab terhadap pemeliharaan satuan pendidikan, hingga tercipta penguatan karakter sosial peserta didik dan masyarakat.

Untuk Provinsi Sumatera Selatan terdapat 564 satuan pendidikan mendapat bantuan revitalisasi sekolah dengan uraian sebagai berikut.

No	Jenjang	Jumlah Sekolah
1	PAUD	26
2	SD	229
3	SMP	172
4	SMA	137
Jumlah		564

Sehubungan dengan hal tersebut sebelum proses pelaksanaan revitalisasi dilakukan, pada tahap persiapan dibentuk struktur Tim Kerja Revitalisasi. Tujuan pembentukan tim ini adalah untuk memastikan keberlangsungan program agar berjalan sesuai dengan kerangka kerja yang telah ditetapkan dalam upaya mencapai tujuan yang ditentukan. Tim Kerja Revitalisasi inilah yang akan bekerja sebagai pengelola program.



Gambar 2.1 Struktur Tim Kerja Revitalisasi

Berdasarkan struktur tim kerja revitalisasi di atas, BB/BPMP atau Tim BB/BPMP berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan program revitalisasi satuan pendidikan dengan peran dan tugas sebagai berikut.

1. Melakukan koordinasi dengan Direktorat Sekolah Dasar terkait program revitalisasi terutama kegiatan sosialisasi
2. Membantu Tim Kerja Pusat dalam pengawasan pelaksanaan program revitalisasi pada satuan pendidikan dan Fasilitator Perguruan Tinggi sesuai kebutuhan dan ketersediaan anggaran

3. Melaporkan pekerjaan pada poin (2) kepada PPK
4. Melaporkan temuan kendala di lapangan yang dihadapi Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan satuan pendidikan.

b. Digitalisasi Pembelajaran

Digitalisasi pembelajaran merupakan bagian strategis dari kebijakan nasional untuk meningkatkan mutu pendidikan dan mempercepat pemerataan layanan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. Melalui Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025, Pemerintah menegaskan percepatan pelaksanaan digitalisasi pembelajaran sebagai salah satu langkah utama dalam pembangunan dan revitalisasi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Kebijakan ini dilatarbelakangi oleh tantangan besar pendidikan Indonesia, seperti penurunan capaian hasil PISA, kesenjangan akses teknologi antardaerah, serta kebutuhan peningkatan kualitas sumber daya manusia agar mampu bersaing secara global.

Digitalisasi pembelajaran diarahkan untuk mendukung transformasi pendidikan yang berfokus pada peningkatan kualitas pembelajaran. Pemanfaatan teknologi digital memungkinkan pembelajaran menjadi lebih interaktif, fleksibel, dan kontekstual sesuai kebutuhan peserta didik. Sejalan dengan peta jalan pendidikan nasional, digitalisasi pembelajaran mendorong inovasi pedagogi modern, pemantapan sistem asesmen, serta penerapan kurikulum berbasis kompetensi fondasional. Hal ini menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pembelajaran bermakna dan penguatan karakter peserta didik di era digital.

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025 juga menekankan pentingnya dukungan sarana dan prasarana pendidikan melalui program digitalisasi pembelajaran. Salah satu implementasinya adalah penyediaan bantuan peralatan digitalisasi pembelajaran melalui konsep *smart classroom* di satuan pendidikan. Bantuan ini mencakup perangkat pembelajaran digital seperti laptop, *smartboard*, media penyimpanan konten pembelajaran, akses internet, hingga solusi energi, seperti panel surya bagi sekolah yang belum memiliki listrik. Skema ini dirancang adaptif berdasarkan tipologi kondisi sekolah sehingga dapat menjangkau wilayah dengan keterbatasan infrastruktur.

Digitalisasi pembelajaran juga berperan penting dalam meningkatkan kemampuan literasi, numerasi, serta sains dan teknologi peserta didik. Akses terhadap *platform* pembelajaran daring dan konten digital berkualitas memungkinkan percepatan distribusi materi ajar serta pemerataan mutu pembelajaran. Selain itu, digitalisasi mendukung

pembelajaran mendalam (*deep learning*) dengan menciptakan lingkungan belajar yang lebih personal, menarik, dan relevan dengan perkembangan zaman, sekaligus memperkuat penguasaan teknologi sejak dini.

Secara keseluruhan, digitalisasi pembelajaran merupakan instrumen kunci dalam mendukung pencapaian Visi Indonesia Emas 2045. Melalui kebijakan yang terintegrasi antara pusat dan daerah, digitalisasi pembelajaran diharapkan mampu mempercepat pembangunan manusia unggul, memperkuat daya saing bangsa, serta mewujudkan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan. Dengan dukungan regulasi seperti Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025 dan implementasi program bantuan peralatan digitalisasi pembelajaran, transformasi pendidikan nasional dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

c. Sistem Penerimaan Murid Baru

Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) merupakan kebijakan nasional yang bertujuan menjamin layanan pendidikan yang bermutu, berkeadilan, objektif, transparan, dan akuntabel bagi seluruh warga negara. Melalui Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025, pemerintah menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh kesempatan pendidikan yang setara tanpa diskriminasi, dengan tetap mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, dan geografis daerah. Kebijakan ini menjadi instrumen penting dalam mewujudkan pemerataan akses pendidikan sekaligus peningkatan mutu layanan pendidikan.

SPMB dilaksanakan pada jenjang TK, SD, SMP, SMA, dan SMK melalui empat jalur penerimaan, yaitu Jalur Domisili, Jalur Afirmasi, Jalur Prestasi, dan Jalur Mutasi. Pengaturan jalur penerimaan tersebut dimaksudkan untuk mendekatkan layanan pendidikan dengan tempat tinggal peserta didik, memberikan akses yang lebih luas bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu dan penyandang disabilitas, serta mendorong pengakuan terhadap prestasi akademik dan nonakademik secara berimbang. Dengan pengaturan ini, diharapkan setiap jalur dapat berfungsi sesuai tujuan dan karakteristiknya.

Perencanaan pelaksanaan SPMB dilakukan berbasis data melalui penetapan wilayah penerimaan murid baru, analisis daya tampung satuan pendidikan, penyusunan petunjuk teknis, serta penyediaan sistem pendaftaran daring. Pemerintah Daerah diwajibkan memanfaatkan Dapodik, data kependudukan, dan data kesejahteraan sosial sebagai dasar pengambilan keputusan, sehingga penetapan kuota dan wilayah penerimaan murid baru dapat dilakukan secara objektif, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam pelaksanaannya, SPMB harus dilaksanakan secara terbuka kepada masyarakat dan bebas dari pungutan. Tahapan pelaksanaan meliputi pengumuman, pendaftaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, dan pendaftaran ulang. Pemerintah Daerah juga berkewajiban menyalurkan calon murid yang tidak tertampung di satuan pendidikan negeri ke satuan pendidikan lain yang masih memiliki daya tampung, termasuk satuan pendidikan swasta, sebagai bentuk perlindungan terhadap hak peserta didik untuk memperoleh layanan pendidikan.

Berdasarkan Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025, terdapat perubahan kebijakan mendasar dalam penerimaan murid baru, yaitu penggantian sistem zonasi menjadi jalur domisili. Jalur domisili menekankan kedekatan tempat tinggal calon murid berdasarkan domisili administratif yang dibuktikan dengan kartu keluarga atau surat keterangan domisili. Pemerintah Daerah diberikan kewenangan yang lebih fleksibel dalam menetapkan wilayah penerimaan dengan mempertimbangkan karakteristik daerah, sebaran satuan pendidikan, dan daya tampung. Pendekatan ini mendorong perencanaan berbasis data, meningkatkan keadilan dan transparansi, serta memastikan pemerataan akses pendidikan yang lebih kontekstual dan berorientasi pada mutu.

Dalam rangka penjaminan mutu dan penyesuaian pelaksanaan SPMB dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, UPT Kemendikdasmen, khususnya BB/BPMP, melaksanakan fungsi pendampingan, pemantauan, dan evaluasi kepada Pemerintah Daerah dan satuan pendidikan. BB/BPMP berperan sebagai penghubung antara Kemendikdasmen dan Pemerintah Daerah dalam menyamakan pemahaman regulasi, mitigasi potensi permasalahan, serta memastikan pelaksanaan SPMB berjalan secara tertib, adil, dan berorientasi pada peningkatan mutu layanan pendidikan.

d. Wajib Belajar 13 Tahun

Program Wajib Belajar 13 Tahun merupakan salah satu program prioritas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam upaya mewujudkan pemerataan dan perluasan akses pendidikan bermutu. Implementasi kebijakan ini mencakup 1 tahun prasekolah, 9 tahun pendidikan dasar, dan 3 tahun pendidikan menengah. Tantangan signifikan yang dihadapi di antaranya adalah tingginya angka anak tidak sekolah (ATS) terutama pada jenjang pendidikan menengah, rendahnya partisipasi pendidikan prasekolah di berbagai daerah, keterbatasan daya tampung, keterbatasan sarana prasarana, dan sebaran guru yang belum merata, kesenjangan mutu layanan pendidikan dan tata kelola yang perlu diperkuat, termasuk komitmen pemerintah daerah. Upaya penyediaan aspek pendukung

Wajib Belajar 13 Tahun, berfokus dan berdampak pada 2 hal yaitu peningkatan partisipasi (akses) dan peningkatan kualitas pendidikan (mutu).

Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) memiliki peran strategis dalam mendukung implementasi kebijakan Wajib Belajar 13 Tahun sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025. BPMP berperan sebagai perpanjangan tangan kementerian di daerah dalam melakukan sosialisasi kebijakan, penguatan pemahaman regulasi, serta pendampingan kepada pemerintah daerah dan satuan pendidikan. Melalui peran ini, BPMP memastikan bahwa kebijakan Wajib Belajar 13 Tahun dipahami secara utuh dan diimplementasikan sesuai dengan prinsip pemerataan, keadilan, dan peningkatan mutu pendidikan.

Selain sosialisasi, BPMP melaksanakan pendampingan teknis kepada pemerintah daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan program Wajib Belajar 13 Tahun. Pendampingan tersebut meliputi penguatan perencanaan berbasis data, pemetaan layanan PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya pendidikan. BPMP juga memfasilitasi koordinasi lintas pemangku kepentingan untuk memastikan ketersediaan dan kesinambungan layanan pendidikan pada seluruh jenjang wajib belajar.

Dalam rangka penjaminan mutu, BPMP melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Wajib Belajar 13 Tahun di daerah. Kegiatan ini mencakup pemantauan angka partisipasi sekolah, keberlanjutan peserta didik dari PAUD ke SD hingga pendidikan menengah, serta keterjangkauan layanan pendidikan bagi kelompok rentan. Hasil pemantauan dan evaluasi tersebut digunakan sebagai dasar rekomendasi kebijakan dan perbaikan berkelanjutan bagi pemerintah daerah dan satuan pendidikan.

Keberhasilan implementasi Wajib Belajar 13 Tahun diukur melalui sejumlah indikator utama. Indikator pertama adalah meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) pada jenjang PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, serta menurunnya angka putus sekolah. Peningkatan indikator ini menunjukkan bahwa akses dan keberlanjutan layanan pendidikan semakin merata dan inklusif.

Indikator keberhasilan berikutnya adalah meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan, yang ditunjukkan oleh bertambahnya satuan pendidikan, pendidik dan tenaga kependidikan, serta sarana dan prasarana pendukung pada seluruh jenjang wajib belajar. Selain itu, efektivitas pemanfaatan pendanaan pendidikan dan berkurangnya beban biaya pendidikan bagi masyarakat menjadi indikator penting dalam menilai keberpihakan kebijakan terhadap kelompok kurang mampu.

Indikator lainnya adalah meningkatnya mutu pembelajaran dan hasil belajar peserta didik, yang tercermin dari perbaikan rapor pendidikan, capaian literasi dan numerasi, serta kualitas transisi peserta didik dari PAUD ke SD dan dari pendidikan dasar ke pendidikan menengah. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa Wajib Belajar 13 Tahun tidak hanya memperluas akses, tetapi juga meningkatkan kualitas layanan pendidikan.

Dengan sinergi antara peran BPMP, pemerintah daerah, dan satuan pendidikan, serta pemantauan indikator keberhasilan secara berkelanjutan, implementasi Wajib Belajar 13 Tahun diharapkan dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan. Peran BPMP sebagai pendamping dan penjamin mutu menjadi kunci dalam memastikan bahwa kebijakan Wajib Belajar 13 Tahun benar-benar berdampak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia secara merata dan berkeadilan.

e. **Penguatan Pendidikan Karakter**

Pendidikan karakter melalui implementasi **7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat** merupakan upaya strategis untuk menanamkan nilai-nilai moral dan etika dasar kepada generasi muda. Tantangan era digital dan degradasi moral, anak-anak membutuhkan fondasi karakter yang kuat agar mampu menjadi pribadi yang berintegritas dan mampu beradaptasi secara positif dalam kehidupan bermasyarakat. Implementasi program ini memerlukan konsistensi keteladanan dari orang dewasa (guru dan orang tua) serta pengaruh lingkungan luar yang mendukung, sehingga internalisasi nilai-nilai tersebut dapat menjadi kebiasaan atau perilaku otomatis dalam kehidupan sehari-hari. Diperlukan penciptaan ekosistem pendidikan yang kolaboratif dan berbasis pembiasaan (habitiasi). Satuan pendidikan harus mengintegrasikan ketujuh kebiasaan ini ke dalam seluruh aktivitas kurikuler dan ekstrakurikuler serta sinergi antara sekolah dan orang tua, agar nilai-nilai yang diajarkan tetap dipraktekkan secara konsisten di rumah. Dengan memberikan apresiasi terhadap perilaku positif dan menjadikan guru sebagai model peran (role model), karakter "Anak Indonesia Hebat" dapat terbentuk secara alami dan berkelanjutan.

Gerakan 7 KAIH merupakan inisiatif strategis dalam mendukung terwujudnya lingkungan pendidikan yang aman, sehat, dan berkarakter melalui keterlibatan aktif keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat. Gerakan ini dirancang sebagai upaya penguatan pembiasaan perilaku positif yang dilakukan secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari peserta didik. Dengan menempatkan anak sebagai pusat perhatian, dan 7 KAIH bertujuan membangun ekosistem pendidikan yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal, baik secara fisik, mental, sosial, maupun emosional.

Penerapan 7 KAIH menekankan pada peran strategis orang tua dan satuan pendidikan dalam membentuk karakter dan kebiasaan baik anak. Orang tua diharapkan menjadi teladan utama dalam menanamkan nilai-nilai positif di lingkungan keluarga, sementara satuan pendidikan berperan mengintegrasikan prinsip-prinsip 7 KAIH ke dalam budaya sekolah dan proses pembelajaran. Sinergi antara rumah dan sekolah menjadi fondasi utama dalam menciptakan kesinambungan pendidikan karakter bagi peserta didik.

Gerakan 7 KAIH juga menjadi instrumen penting dalam upaya pencegahan berbagai risiko yang dapat menghambat perkembangan peserta didik, seperti kekerasan, perundungan, perilaku tidak sehat, serta gangguan kesehatan mental. Melalui pembiasaan dan penguatan kesadaran bersama, gerakan ini mendorong terciptanya lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan inklusif. Dengan demikian, peserta didik dapat tumbuh dan belajar dalam suasana yang mendukung rasa aman, kepercayaan diri, dan kesejahteraan.

Selain itu, 7 KAIH menyampaikan pesan resmi tentang pentingnya tanggung jawab bersama dalam penyelenggaraan pendidikan. Keberhasilan program ini tidak hanya ditentukan oleh kebijakan dan program pemerintah, tetapi juga oleh komitmen dan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan. Keterlibatan masyarakat dan lingkungan sekitar sekolah menjadi faktor pendukung dalam memperluas dampak positif 7 KAIH secara berkelanjutan.

Melalui implementasi program 7 KAIH secara konsisten dan terencana, diharapkan dapat terwujud generasi peserta didik yang sehat, berkarakter, mandiri, dan berakhlak mulia. Gerakan ini menegaskan bahwa pendidikan yang bermutu tidak hanya berfokus pada pencapaian akademik, tetapi juga pada pembentukan kepribadian dan kebiasaan hidup yang positif. Dengan komitmen bersama, program 7 KAIH diharapkan menjadi bagian dalam upaya peningkatan mutu pendidikan nasional.

f. Makan Bergizi Gratis

Program Makan Bergizi (MBG) merupakan kebijakan strategis pemerintah dalam mendukung peningkatan kualitas kesehatan dan pembelajaran peserta didik melalui pemenuhan gizi yang cukup, aman, dan seimbang. Program ini bertujuan untuk memastikan peserta didik memperoleh asupan gizi yang sesuai dengan kebutuhan usia dan tahap perkembangan, sehingga mampu menunjang konsentrasi belajar, daya tahan tubuh, serta tumbuh kembang secara optimal. MBG menjadi bagian integral dari upaya peningkatan mutu pendidikan yang tidak hanya berfokus pada aspek akademik, tetapi juga kesejahteraan peserta didik.

Pelaksanaan Program MBG di satuan pendidikan dilaksanakan berdasarkan prinsip pemenuhan gizi seimbang, keamanan pangan, dan keberlanjutan program. Makanan yang disediakan harus memenuhi standar gizi, memperhatikan keragaman pangan lokal, serta disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik pada setiap jenjang pendidikan. Selain itu, pelaksanaan MBG juga memperhatikan aspek kebersihan, sanitasi, dan keamanan pangan untuk mencegah risiko gangguan kesehatan di lingkungan sekolah. Selain penyediaan makanan bergizi, Program MBG juga menekankan pentingnya **edukasi gizi** kepada peserta didik. Edukasi gizi bertujuan membangun pemahaman dan kesadaran peserta didik mengenai pola makan sehat, pentingnya konsumsi makanan bergizi seimbang, serta kebiasaan hidup bersih dan sehat. Materi edukasi gizi diintegrasikan dalam kegiatan pembelajaran dan pembiasaan di sekolah, sehingga peserta didik tidak hanya menerima makanan bergizi, tetapi juga memahami nilai dan manfaatnya bagi kesehatan dan prestasi belajar.

Dalam implementasinya, keberhasilan Program MBG memerlukan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, satuan pendidikan, serta pemangku kepentingan terkait. Peran pendidik dan tenaga kependidikan menjadi penting dalam mendampingi peserta didik, mengawasi pelaksanaan program, serta mengintegrasikan edukasi gizi ke dalam budaya sekolah. Dengan kolaborasi yang baik, Program MBG diharapkan dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

Strategi advokasi, koordinasi, dan komunikasi menjadi elemen penting dalam mendukung keberhasilan implementasi Program MBG. Advokasi dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan komitmen para pemangku kepentingan terhadap tujuan dan manfaat program. Koordinasi diperlukan untuk menyelaraskan peran dan tanggung jawab antarinstansi, sedangkan komunikasi yang efektif berfungsi untuk memastikan informasi program tersampaikan secara jelas, konsisten, dan dapat dipahami oleh seluruh pihak terkait, termasuk satuan pendidikan dan masyarakat.

Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) memiliki peran strategis dalam mendukung implementasi Program MBG di satuan pendidikan. BPMP berperan dalam mensosialisasikan kebijakan dan arah pelaksanaan Program MBG kepada pemerintah daerah dan satuan pendidikan, serta memperkuat pemahaman mengenai prinsip pelaksanaan yang sesuai dengan standar mutu pendidikan. Melalui kegiatan koordinasi dan pendampingan, BPMP membantu memastikan bahwa implementasi MBG selaras dengan kebijakan nasional dan terintegrasi dengan upaya peningkatan mutu layanan pendidikan.

Selain itu, BPMP juga berperan dalam melakukan pemantauan dan penguatan praktik baik pelaksanaan Program MBG di satuan pendidikan. Hasil pemantauan tersebut digunakan sebagai bahan rekomendasi perbaikan dan pengembangan program secara berkelanjutan. Dengan sinergi antara Program MBG dan peran BPMP sebagai UPT penjaminan mutu, diharapkan satuan pendidikan dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih sehat, inklusif, dan mendukung pencapaian tujuan pendidikan nasional.

g. Pembelajaran dan Penilaian

Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terus mendorong transformasi pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi, karakter, dan literasi peserta didik dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia unggul menghadapi tantangan global. Salah satu pilar penting dari transformasi ini adalah perubahan pendekatan pembelajaran dan penilaian yang berfokus pada pembelajaran yang bermakna, kontekstual, dan berpihak pada kebutuhan peserta didik.

Pembelajaran Mendalam dirancang sebagai pendekatan yang mampu menjawab tantangan krisis pembelajaran dan kebutuhan pembelajaran abad ke-21. Pendekatan ini bertujuan untuk mendorong pengembangan keterampilan berpikir tingkat tinggi, penerapan pengetahuan dalam konteks dunia nyata, serta pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan.

BPMP Provinsi Sumatera Selatan melakukan sosialisasi pembelajaran dan penilaian (pembelajaran mendalam, coding, dan kecerdasan artifisial) kepada satuan pendidikan penerima BOSP Kinerja untuk memperkenalkan dan meningkatkan pemahaman satuan pendidikan penerima Bospkin terhadap pendekatan dan inovasi dalam pembelajaran dan penilaian, khususnya yang berkaitan dengan pembelajaran mendalam (*deep learning*), coding, dan kecerdasan artifisial (*Artificial Intelligence* atau AI). Selain itu, juga dilakukan sosialisasi program pembelajaran dan penilaian kepada Pemda, dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman dan dukungan Pemerintah Daerah terhadap kebijakan, program, dan praktik pembelajaran serta penilaian yang diterapkan di satuan pendidikan. Sosialisasi dilakukan untuk memastikan adanya keselarasan antara kebijakan pusat dan pelaksanaan di daerah, serta mendorong peran aktif Pemerintah Daerah dalam mengawal mutu proses dan hasil belajar.

Dalam konteks penguatan transformasi pembelajaran, satuan pendidikan penerima BOSP Kinerja Berkemajuan terbaik diarahkan untuk melaksanakan pelatihan Pembelajaran Mendalam (*deep learning*), Coding, dan Kecerdasan Artifisial. Pelatihan ini selaras dengan

arah kebijakan nasional, yang menekankan pentingnya pengembangan kompetensi berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan pemecahan masalah melalui pendekatan pembelajaran yang berpusat pada murid.

Pembelajaran mendalam menjadi fondasi untuk membangun pemahaman konseptual yang bermakna, sementara koding dan kecerdasan artifisial memperkuat literasi digital dan kesiapan peserta didik menghadapi perkembangan teknologi.

Pelaksanaan pelatihan Pembelajaran Mendalam, Koding, dan Kecerdasan Artifisial pada satuan pendidikan penerima BOSP Kinerja diharapkan tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas pembelajaran internal sekolah, tetapi juga menghasilkan praktik baik (*best practices*) yang dapat direplikasi oleh satuan pendidikan lain. Satuan pendidikan berkemajuan terbaik diharapkan berperan sebagai pusat pembelajaran yang mampu mengimbaskan inovasi pembelajaran kepada lingkungan sekitarnya melalui jejaring kolaborasi dan pendampingan.

h. Penjaminan Mutu Pendidikan

Penjaminan mutu pendidikan merupakan tanggung jawab kolektif yang dilakukan secara sinergis. Pemda berperan menjamin mutu secara eksternal melalui pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan kebijakan anggaran, sementara satuan pendidikan melakukan penjaminan mutu internal melalui peningkatan kualitas pembelajaran serta tata kelola berbasis Rapor Pendidikan untuk mencapai standar nasional secara berkelanjutan.

Pemerintah Daerah (Pemda) memegang peranan sentral dalam penjaminan mutu pendidikan melalui pemenuhan **Standar Pelayanan Minimal (SPM)** sebagaimana diatur dalam regulasi nasional. Regulasi dimaksud adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, juga Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 195/M/2023 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pendidikan.

Fokus utama Pemda adalah memastikan bahwa setiap warga negara usia sekolah mendapatkan layanan pendidikan yang berkualitas, relevan, dan terjangkau secara merata. Dalam praktiknya, penjaminan mutu oleh Pemda dilakukan melalui serangkaian langkah strategis. Pertama, **pemetaan mutu** berdasarkan data Rapor Pendidikan untuk mengidentifikasi kesenjangan capaian literasi, numerasi, dan iklim keamanan sekolah. Kedua, Pemda melakukan **perencanaan berbasis data (PBD)** yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan daerah (RKPD) dan penganggaran (APBD). Hal ini memastikan

alokasi sumber daya diprioritaskan untuk pemenuhan indikator SPM, seperti ketersediaan sarana prasarana yang layak, distribusi guru yang merata, serta peningkatan kompetensi pendidik.

Selain itu, Pemda melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap kinerja satuan pendidikan. Penjaminan mutu ini bukan sekadar pemenuhan administratif, melainkan ikhtiar transformatif untuk memastikan standar teknis pelayanan pendidikan terpenuhi di seluruh pelosok daerah. Dengan mengoptimalkan SPM, Pemda tidak hanya menjalankan kewajiban konstitusional, tetapi juga membangun pondasi kuat bagi peningkatan daya saing sumber daya manusia di daerah. Sinergi antara kebijakan pusat dan eksekusi daerah melalui kerangka SPM menjadi kunci utama terciptanya ekosistem pendidikan yang bermutu, inklusif, dan akuntabel.

Berdasarkan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021, tingkat pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) diukur melalui **Indeks Pencapaian SPM**. Indeks ini mencerminkan sejauh mana Pemda berhasil memberikan layanan pendidikan dasar (PAUD, SD, SMP) sesuai standar yang ditetapkan. Berikut adalah klasifikasi kategori ketuntasan berdasarkan skor indeksnya.

Kategori Ketuntasan	Skor Indeks (0-100)	Deskripsi Kondisi
Paripurna	100	Pemda telah mencapai seluruh indikator layanan dasar dengan kualitas yang sangat baik.
Tuntas Utama	90 - 99	Pemda telah mencapai hampir seluruh indikator layanan dasar dengan kualitas yang sangat baik.
Tuntas Madya	80 - 89	Pemda sudah memenuhi standar di atas rata-rata, namun masih ada beberapa indikator yang perlu penguatan kecil.
Tuntas Pratama	70 -79	Pemda berada pada level menengah; pemenuhan standar sudah berjalan namun belum merata di seluruh unit pendidikan.
Tuntas Muda	60 - 69	Pemda masih dalam tahap awal pemenuhan standar dan memerlukan upaya signifikan untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan.
Belum Tuntas	< 60	Pemda belum memenuhi standar minimal dan memerlukan upaya signifikan untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan.

Penjaminan mutu di satuan pendidikan dilaksanakan melalui **Siklus Penjaminan Mutu Internal (SPMI)** yang berkesinambungan untuk memastikan peningkatan kualitas pembelajaran. Siklus ini dimulai dari **pemetaan mutu** menggunakan data Rapor Pendidikan,

diikuti dengan **Perencanaan Berbasis Data (PBD)** untuk menetapkan skala prioritas. Selanjutnya, sekolah melakukan **pelaksanaan rencana** melalui inovasi pembelajaran dan pengembangan kompetensi guru. Tahap akhir adalah **monitoring dan evaluasi** untuk mengukur dampak kebijakan terhadap capaian literasi dan numerasi siswa. Melalui siklus "Identifikasi, Refleksi, Benahi" ini, satuan pendidikan secara mandiri dan akuntabel mampu mentransformasi standar nasional menjadi ekosistem belajar yang berkualitas bagi seluruh murid.

BPMP Provinsi Sumatera Selatan telah menetapkan target sasaran program prioritas dan alokasi anggaran tahun 2025 sebagai berikut.

Tabel 2.2 Program Prioritas BPMP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025

No.	Nama Program Prioritas	Target Sasaran 2025	Alokasi Anggaran 2025 (Rp)
a	Revitalisasi Sekolah	<ol style="list-style-type: none"> 564 satuan pendidikan direvitalisasi Satu sekolah baru 	357.651000
b	Digitalisasi Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> Penyediaan bantuan sarana digitalisasi pembelajaran tersalurkan pada 8.990 satuan pendidikan dan sesuai dengan spesifikasi Pendampingan multimoda pengelolaan bantuan sarana digitalisasi pembelajaran 	349.458000
c	Sistem Penerimaan Murid Baru	<ol style="list-style-type: none"> 100% Pemda sudah menetapkan petunjuk teknis (juknis) SPMB Pemda Provinsi dan 20% Pemda Kab/Kota melibatkan sekolah swasta dalam SPMB. Pemda Provinsi dan 40% Pemda Kab/Kota melaksanakan penandatanganan pakta integritas/komitmen bersama atau deklarasi SPMB bersih 	144.902000
d	Wajib Belajar 13 Tahun	<ol style="list-style-type: none"> [Dit. PAUD] Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD tahun 2025 sebesar 36,61% Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5-6 tahun pada tahun 2025 sebesar 77,3% [Dit. SD] Objektif 2A: Persentase Kab/kota dengan Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 tahun diatas 99% sebesar 77,24% [Dit. SD] Objektif 2B: Jumlah anak tidak sekolah yang mendapatkan layanan pendidikan di jenjang SD sebesar 4.320 orang [Dit. SMP] Objektif 3A: Persentase Kab/Kota dengan Angka Partisipasi 	841.508.000

No.	Nama Program Prioritas	Target Sasaran 2025	Alokasi Anggaran 2025 (Rp)
		<p>Sekolah (APS) 13-15 tahun di atas 95% sebesar 100%</p> <p>6. [Dit. SMP] Objektif 3B: Jumlah anak tidak sekolah yang mendapatkan layanan pendidikan di jenjang SMP sebesar 3.191 orang</p> <p>7. [Dit. SMA] Objektif 4A: Persentase provinsi dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/SMLB/MA/Sederajat di atas 95% sebesar 100 %</p> <p>8. [Dit. SMA] Objektif 4B: Jumlah anak tidak sekolah yang mendapatkan layanan pendidikan di jenjang SMA sebesar 1.327 orang</p>	
e	Penguatan Pendidikan karakter	<ol style="list-style-type: none"> Seluruh satuan pendidikan menerapkan Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat (G7KAIH) 60% satuan pendidikan mendapatkan advokasi pelaksanaan G7KAIH 	681.333000
f	Makan Bergizi Gratis	<ol style="list-style-type: none"> 500 satuan pendidikan penerima manfaat MBG teridentifikasi data kesiapan dan persiapannya menerima program MBG 18 pemerintah daerah yang telah mendapatkan manfaat program MBG mendapatkan pendampingan 14 dari 19 data indikator evaluasi program MBG di satuan pendidikan teridentifikasi 	422.361000
g	Pembelajaran dan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 100% satuan pendidikan penerima dana BOS Kinerja (Boskin) menerapkan Pembelajaran Mendalam 100% satuan pendidikan penerima dana BOS Kinerja (Boskin) menerapkan pembelajaran Koding dan Kecerdasan Artifisial (KA) 50% Dinas Pendidikan Prov./Kab./Kota mendukung upaya peningkatan kualitas pembelajaran (Pembelajaran Mendalam, Koding dan KA, peningkatan literasi numerasi dan sains, perubahan iklim). 100% Dinas Pendidikan Prov./Kab./Kota mendukung upaya peningkatan kualitas penilaian (seperti digitalisasi ijazah, TKA, ANBK, atau e-Rapor) 	144.355000
h	Penjaminan Mutu Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 100% satuan pendidikan dapat dipetakan sesuai 8 SNP 31% satuan pendidikan (Dasmen) memiliki capaian mutu sesuai SNP 57% satuan pendidikan (Dasmen) 	1.611.486.000

No.	Nama Program Prioritas	Target Sasaran 2025	Alokasi Anggaran 2025 (Rp)
		menerapkan PMP 4. 5% pemda memiliki capaian mutu sesuai SPM (minimal Tuntas Madya) 5. 79% pemda mengalokasikan sumber daya sesuai capaian Rapor Pendidikan	

B.2. Layanan Dukungan Manajemen Internal

a. Reformasi Birokrasi Internal (RBI)

Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) di BPMP Provinsi Sumatera Selatan merupakan perjalanan proses transformasi berkelanjutan yang dilakukan berdasar refleksi dan evaluasi secara konsisten sejak tahun 2020 hingga 2025. Kegagalan yang dihadapi pada periode tahun penilaian satuan kerja Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) menjadi momentum untuk melakukan penguatan komitmen pimpinan dan seluruh pegawai dengan menempatkan integritas sebagai fondasi utama dalam tata kelola organisasi.

Secara khusus terkait tugas dan fungsi BPMP Provinsi Sumatera Selatan sebagai UPT Kemendikdasmen, upaya reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas yang dilakukan memiliki beberapa tantangan. Yaitu, adanya SPM pendidikan yang belum tuntas di Provinsi/Kabupaten/Kota, literasi dan numerasi yang masih rendah, supervisi dan pendampingan yang belum optimal, serta budaya organisasi yang masih harus diperkuat. Pada kondisi inilah pentingnya strategi untuk melakukan berbagai perbaikan (*reform*) dan berbagai perubahan yang berkelanjutan.

Perubahan ini bukan sekadar administratif, melainkan menyentuh akar budaya kerja melalui forum-forum interaktif organisasi, tidak hanya untuk penguatan kapasitas sumber daya manusia/pegawai seperti **Apel Senin Berpijar (Bersemangat Pagi Belajar)** dan **Kombel Cerdas (Komunitas Belajar dan Diskusi Asyik)** namun juga penguatan di **tata kelola dan akuntabilitas organisasi seperti forum Patin (rapat rutin).**

Lebih lanjut untuk menguatkan peran, tugas dan fungsi serta komitmen BPMP Provinsi Sumatera Selatan BPMP Provinsi Sumatera Selatan juga mengembangkan berbagai inovasi kolaboratif seperti “Konsensus”, “Serasan”, dan “Pikat Bidar”, yang tidak hanya mendukung pencapaian kinerja utama lembaga, tetapi juga memperkuat peran BPMP sebagai *trusted advisor* bagi Pemerintah Daerah dan ekosistem pendidikan. Pengendalian gratifikasi,

penanganan benturan kepentingan, penyusunan peta risiko, serta penguatan WBS dilakukan secara sistematis sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi.

Selanjutnya upaya reformasi birokrasi yang dilakukan dengan mengintegrasikan pencegahan korupsi yang sistematis dan inovasi layanan publik yang nyata, BPMP provinsi Sumatera Selatan kini hadir sebagai *trusted advisor* bagi ekosistem pendidikan. Keberhasilan ini tercermin dari capaian SAKIP yang unggul dan dampak positif terhadap pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan, membuktikan bahwa pelayanan yang dilakukan secara optimal mampu membawa kemajuan yang berkelanjutan.

Upaya pembangunan ZI-WBK difokuskan pada perubahan nyata dalam enam area pengungkit, yaitu manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Perubahan tersebut diwujudkan melalui pembentukan forum-forum strategis seperti Patin, Apel Senin Berpijar, Kombel Cerdas, dan Jumat Kelakar yang mendorong budaya kerja kolaboratif, transparan, dan berorientasi kinerja. Digitalisasi proses kerja, penerapan sistem paperless, serta keterbukaan informasi publik menjadi bagian penting dalam memperkuat tata kelola yang akuntabel.

Hasil dari pembangunan ZI-WBK ini tercermin pada meningkatnya kinerja organisasi, capaian SAKIP, dan kinerja anggaran, perbaikan layanan publik, serta dampak nyata pada pemenuhan SPM Pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan di Sumatera Selatan. Dengan semangat dan moto **MELEJIT Melayani dengan HATI**, BPMP Provinsi Sumatera Selatan meneguhkan komitmen untuk terus tumbuh bersama integritas dan menghadirkan layanan publik yang bersih, profesional, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Dalam upaya mendukung reformasi birokrasi internal, BPMP Provinsi Sumatera Selatan melakukan penyederhanaan struktur dan memperkaya fungsi-fungsi yang terkait agar tata kelola organisasi menjadi fleksibel dan efisien. BPMP Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan SK Mendikbudristek Nomor 29/0/2022 telah berhasil dan ditetapkan menjadi salah satu satuan kerja dengan status Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi. Selanjutnya, dengan status tersebut BPMP Provinsi Sumatera Selatan berkontribusi secara aktif dalam mendampingi satuan kerja lain yang masih berproses meraih predikat ZI WBK. Sehubungan penerapan RBI ditahun 2023 tim BPMP Provinsi Sumatera Selatan telah melaksanakan pendampingan Reformasi Birokrasi menuju Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (ZI-WBK) kepada BPMP Provinsi Sulawesi Tenggara. Atas partisipasi ini, BPMP Provinsi Sumatera Selatan menerima penghargaan dari Sekretariat Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen.

b. Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Sistem Akuntabilitas adalah sistem yang dirancang untuk membantu penerima amanah mempertanggungjawabkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran yang diamanahkan, artinya setiap program dan kegiatan dari penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan hasilnya dengan tujuan terjadi perubahan pola pikir atau paradigma yang berorientasi pada kinerja dan komitmen seluruh jajaran organisasi terutama pimpinan untuk menerapkan manajemen kinerja, peningkatan kompetensi SDM dan pengembangan data kinerja (*IT-based*).

Sehubungan dengan hal tersebut BPMP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 menetapkan target A berdasarkan Perjanjian Kinerja antara Kepala BPMP Provinsi Sumatera Selatan dengan Direktur Jenderal PAUD, Dikdas, dan Dikmen. BPMP Provinsi Sumatera Selatan selalu melakukan peningkatan perbaikan pertanggungjawaban efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran melalui integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran, sistem pengawasan dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Pada tahun 2025 BPMP Provinsi Sumatera Selatan berhasil merealisasikan pencapaian sesuai target dengan mendapatkan nilai A dengan poin 90.00.

Sehubungan dengan pencapaian tersebut, BPMP Provinsi Sumatera Selatan senantiasa berkomitmen untuk melaksanakan beberapa langkah strategis sebagai berikut:

1. Optimalisasi pemanfaatan aplikasi digital sebagai platform kolaborasi di internal BPMP melalui aplikasi SPASIKITA Kemendikdasmen.
2. Menjadwalkan rapat rutin secara berkala terkait pengukuran kinerja terhadap capaian Indikator kinerja kegiatan sehingga mengetahui terkait dengan progress, kendala dan hambatan serta membuat strategi atau tindaklanjut dalam mengatasi kendala dan hambatan yang dihadapi.
3. Sosialisasi Perjanjian Kinerja pada seluruh karyawan melalui apel dan rapat rutin seninan;
4. Workshop Penyusunan Laporan Kinerja tahun berjalan
5. Reviu laporan kinerja oleh tim evaluasi
6. Melaksanakan akuntabilitas mandiri satker melalui aplikasi SPASIKITA
7. Menindaklanjuti rekomendasi hasil Lembar Hasil Evaluasi (LHE) dan di-*input* pada aplikasi SPASIKITA.

C. Rencana Kerja dan Anggaran

Rencana kerja dan anggaran BPMP Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2025 sebagai berikut.

Tabel 2.3 Rencana Kerja dan Anggaran BPMP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025

KODE	URAIAN	PAGU AWAL (Rp)	PAGU AKHIR (Rp)
419528	BPMP Provinsi Sumatera Selatan	31.076.529.000	25.008.359.000
7605	Layanan Penjaminan Mutu Pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, Dikmen, dan Dikmas	13.302.772.000	7.228.885.000
7606	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah	17.773.757.000	17.779.474.000

D. Perjanjian Kinerja

Sebagai upaya mewujudkan tujuan dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2025 s.d. 2029, BPMP Provinsi Sumatera Selatan merumuskan kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2025, dan dituangkan dalam perjanjian kinerja berikut.

Tabel 2.4 Matriks Perjanjian Kinerja dan Renstra BPMP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Target 2025		
			Renstra	PK	Satuan
SK 1	Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen				
IKK 1.1	Persentase satuan pendidikan yang memanfaatkan hasil asesmen tingkat nasional untuk peningkatan kualitas pembelajaran	Persentase	64,06	64,06	%
IKK 1.2	Persentase daerah (provinsi dan kabupaten/kota) yang memenuhi SPM pendidikan	Persentase	57,51	57,51	%
SK 2	Meningkatnya tata kelola BPMP Provinsi Sumatera Selatan				
IKK 2.1	Capaian Nilai Kinerja Anggaran BPMP Provinsi Sumatera Selatan dengan kategori sangat baik	Kategori	Sangat Baik	Sangat Baik	Kategori

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Target 2025		
			Renstra	PK	Satuan
IKK 2.2	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BPMP Provinsi Sumatera Selatan minimal A	Predikat	A	A	Predikat

BAB III | AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan ini merupakan media pertanggungjawaban BPMP Provinsi Sumatera Selatan dalam mencapai kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025, dan dilakukan dalam upaya memberikan kontribusi memenuhi visi Presiden Republik Indonesia dalam penjaminan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah yaitu “Terwujudnya pendidikan bermutu untuk semua dengan dukungan partisipasi semesta dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”.

A. Capaian Kinerja



Sesuai perjanjian kinerja tahun 2025, BPMP Provinsi Sumatera Selatan menetapkan dua sasaran kegiatan dengan empat indikator kinerja kegiatan. Berikut informasi tingkat ketercapaiannya selama tahun 2025.

Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja BPMP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Persentase Capaian Kinerja
SK 1. Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen	IKK 1.1. Persentase satuan pendidikan yang memanfaatkan hasil asesmen tingkat nasional untuk peningkatan kualitas pembelajaran	64,06	77,23	120,56%
	IKK 1.2. Persentase daerah (provinsi dan kabupaten/kota) yang memenuhi SPM pendidikan	57,61	50	86,79%
SK 2. Meningkatnya tata kelola BPMP Provinsi Sumatera Selatan	IKK 2.1. Capaian Nilai Kinerja Anggaran BPMP Provinsi Sumatera Selatan dengan kategori sangat baik	Sangat Baik	Sangat Baik	100,00%
	IKK2.2. Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BPMP Provinsi Sumatera Selatan minimal A	A	A	100,00%
Total Capaian PK				407,35%
Nilai Kinerja Organisasi (NKO) atau Rata-rata Capaian PK				101,84%

Rata-rata capaian kinerja BPMP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 sebesar 101,84%, dengan realisasi sesuai dengan target yang ditetapkan pada 3 IKK yaitu IKK 1.1, IKK 2.1 serta IKK 2.2, sedangkan realisasi IKK 1.2 belum mencapai target yang ditetapkan.

Hasil pengukuran capaian kinerja BPMP Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2025 dan analisis perbandingan target dan realisasi tahun berjalan dengan target Renstra 2025-2029 dapat digambarkan dalam tabel berikut.

Tabel 3.2 Perbandingan Target dan Realisasi Tahun Berjalan dengan Target Renstra

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target Kinerja									
		2025		2026		2027		2028		2029	
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
SK 1	Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen										
IKK 1.1	Persentase satuan pendidikan yang memanfaatkan hasil asesmen tingkat nasional untuk peningkatan kualitas pembelajaran	64,06	96,99	65,34		66,64		67,98		69,34	
IKK 1.2	Persentase daerah (provinsi dan kabupaten/kota) yang memenuhi SPM pendidikan	57,61	50,00	67,75		72,64		77,72		82,61	
SK 2	Meningkatnya tata kelola BPMP Provinsi Sumatera Selatan										
IKK 2.1	Capaian Nilai Kinerja Anggaran BPMP Provinsi Sumatera Selatan dengan kategori sangat baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik		Sangat Baik		Sangat Baik		Sangat Baik	
IKK 2.2	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BPMP Provinsi Sumatera Selatan minimal A	A	A	A		A		A		A	

BPMP Provinsi Sumatera Selatan menetapkan dua sasaran kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Strategis BPMP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025- 2029 sebagai berikut:

1. Meningkatkan mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen;
2. Meningkatnya tata kelola BPMP Provinsi Sumatera Selatan.

Sasaran Kegiatan 1



Meningkatnya Mutu Pendidikan Jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen

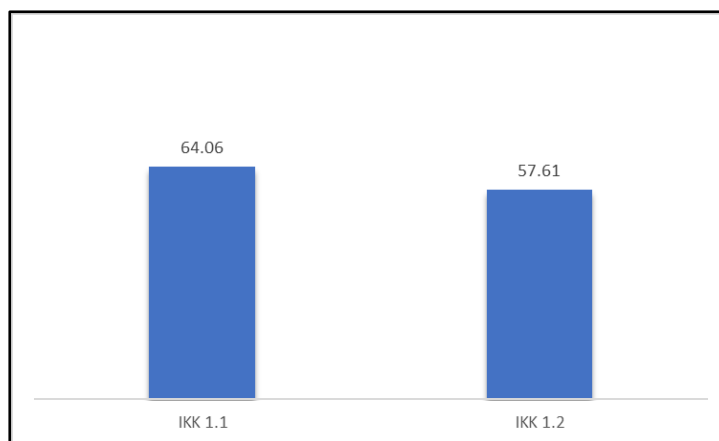
Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, khususnya pasal 1 ayat 1, bahwa “Evaluasi Sistem Pendidikan adalah evaluasi terhadap layanan pendidikan, kinerja satuan pendidikan, dan program pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dalam rangka pemenuhan standar nasional pendidikan sebagai bagian dari proses pengendalian, penjaminan, penetapan, dan peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan”.

Sasaran Kegiatan 1 (SK 1) adalah Meningkatkan mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen, untuk ketercapaian Sasaran Kegiatan tersebut didukung oleh 2 Indikator Kinerja Kegiatan yaitu:

IKK 1.1 Persentase satuan pendidikan yang memanfaatkan hasil asesmen tingkat nasional untuk peningkatan kualitas pembelajaran, dan

IKK 1.2 Persentase daerah (provinsi dan kabupaten/kota) yang memenuhi SPM pendidikan.

Target masing-masing indikator kinerja kegiatan pada SK 1 sebagai berikut.



**Gambar 3.1 Target Kinerja Sasaran Kegiatan 1
BPMP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025**

Hasil penjaminan mutu pendidikan tersebut bermuara pada meningkatnya mutu Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah di Provinsi Sumatera Selatan.



IKK 1.1 Persentase satuan pendidikan yang memanfaatkan hasil asesmen tingkat nasional untuk peningkatan kualitas pembelajaran

Definisi Operasional “IKK 1.1 Persentase satuan pendidikan yang memanfaatkan hasil asesmen tingkat nasional untuk peningkatan kualitas pembelajaran” adalah setiap satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah akan dievaluasi mutunya secara berkala melalui asesmen. Evaluasi tersebut mencakup pengukuran kompetensi kognitif: literasi numerasi, kompetensi sosial emosional berupa karakter peserta didik, serta kualitas lingkungan belajarnya. Program Kemendikdasmen untuk melakukan pengukuran terstandar adalah Asesmen Nasional (AN) yang bertujuan untuk mengevaluasi sistem pendidikan. Hasil AN tersebut dapat menggambarkan kompetensi kognitif murid, karakter murid, kualitas pembelajaran, iklim keamanan, iklim kebinekaan dan iklim inklusivitas satuan pendidikan. Data capaian kompetensi tersebut akan menjadi basis penyusunan profil dan rapor satuan pendidikan. Diharapkan sekolah dapat melakukan perencanaan berbasis data untuk evaluasi diri dari waktu ke waktu.

Target, Realisasi dan Capaian

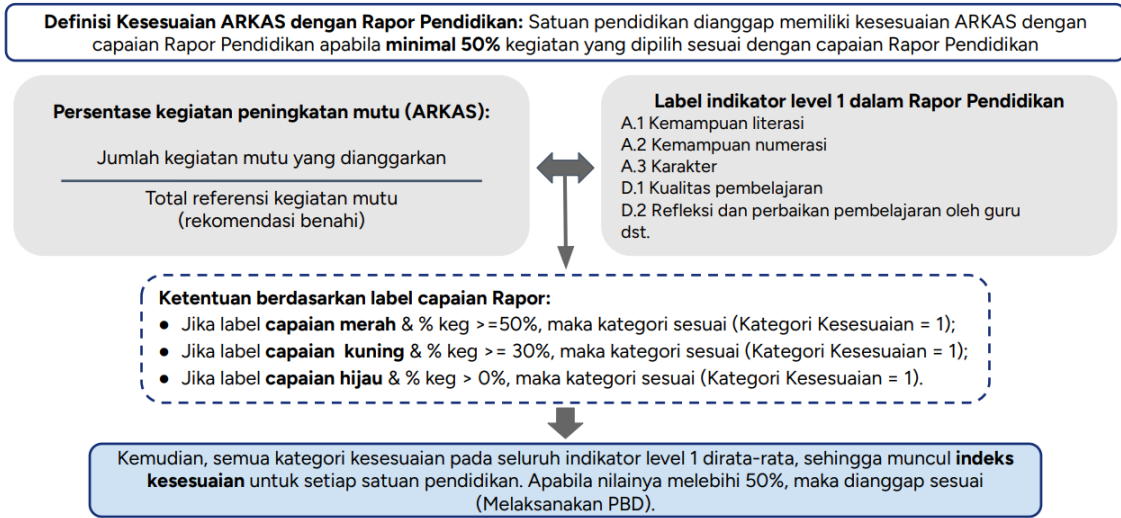
Target kinerja “Persentase satuan pendidikan yang memanfaatkan hasil asesmen tingkat nasional untuk peningkatan kualitas pembelajaran” pada Perjanjian Kinerja BPMP Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 sebesar 64,06%.

Realisasi IKK 1.1 dihitung dengan rumus berikut.

$$\text{IKK 1.1} = \frac{\text{Jumlah satuan pendidikan yang memanfaatkan hasil asesmen tingkat nasional untuk upaya peningkatan kualitas pembelajaran}}{\text{Jumlah seluruh satuan pendidikan}} \times 100\%$$

Penjelasan perhitungan jumlah sekolah yang memanfaatkan hasil asesmen tingkat nasional untuk upaya peningkatan kualitas pembelajaran dapat dilihat pada Gambar 3.3 berikut.

Gambaran Kesesuaian ARKAS dengan Rapor Pendidikan Cara perhitungan menggunakan kriteria minimal kesesuaian 50%



Gambar 3.2 Perhitungan Satuan Pendidikan yang Memanfaatkan Hasil Asesmen Tingkat Nasional untuk Upaya Peningkatan Kualitas Pembelajaran

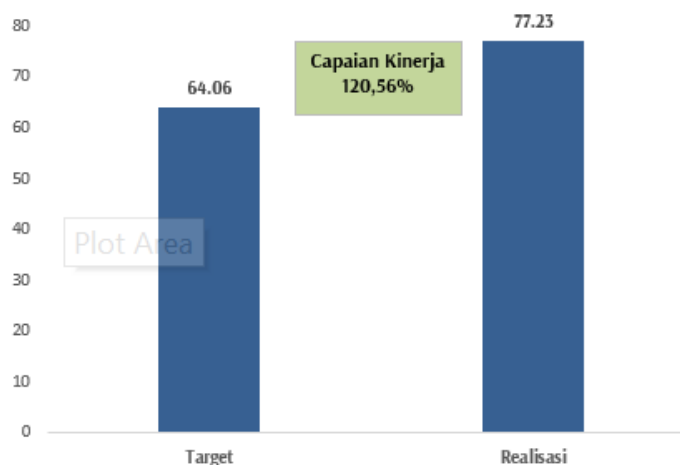
Realisasi IKK 1.1. BPMP Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan data pemanfaatan hasil asesmen nasional yang bersumber dari Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) dan Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BKSAP) sebagai berikut.

$$\text{IKK 1.1} = \frac{\text{Jumlah satuan pendidikan yang memanfaatkan hasil asesmen tingkat nasional untuk upaya peningkatan kualitas pembelajaran}}{\text{Jumlah seluruh satuan pendidikan}} \times 100\%$$


$$\text{IKK 1.1} = \frac{5455}{7063} \times 100\%$$

$$\text{IKK 1.1} = 77,23\%$$

Dengan demikian realisasi IKK 1.1 BPMP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 sebesar 77,23%, melampaui target yang ditetapkan sebesar 64,06% sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 120,26%, seperti dapat dilihat pada Gambar 3.2 berikut.



Gambar 3.3 Target dan Realisasi Kinerja IKK 1.1 BPMP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025



IKK 1.2 Persentase daerah (provinsi dan kabupaten/kota) yang memenuhi SPM pendidikan

Definisi operasional **persentase daerah (provinsi dan kabupaten/kota) yang memenuhi SPM pendidikan** adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar pendidikan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap Peserta Didik secara minimal. (Permendikbud No. 32 Tahun 2022 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan).

Target, Realisasi dan Capaian

Target kinerja IKK 1.2 “Persentase daerah (provinsi dan kabupaten/kota) yang memenuhi SPM pendidikan” BPMP Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 sebesar 57,61% atau sebanyak 10 daerah (prov/kab/kota) yang memenuhi SPM Pendidikan pada kategori Tuntas Pratama dan Tuntas Madya.

Realisasi perhitungan IKK 1.2 sebagai berikut.

$$\text{IKK 1.2} = \frac{\text{Provinsi/Kabupaten/Kota yang memenuhi SPM}}{\text{Jumlah seluruh provinsi/kabupaten/kota}} \times 100\%$$

Untuk mengetahui indeks capaian SPM masing-masing daerah (provinsi/kabupaten/kota) maka dilakukan metode perhitungan berikut.

Indeks		Persentase pencapaian
Capaian	= Persentase pencapaian mutu	penerima layanan dasar
SPM	minimal layanan dasar x Bobot	x Bobot Penerima
	Mutu (20%)	layanan (80%)

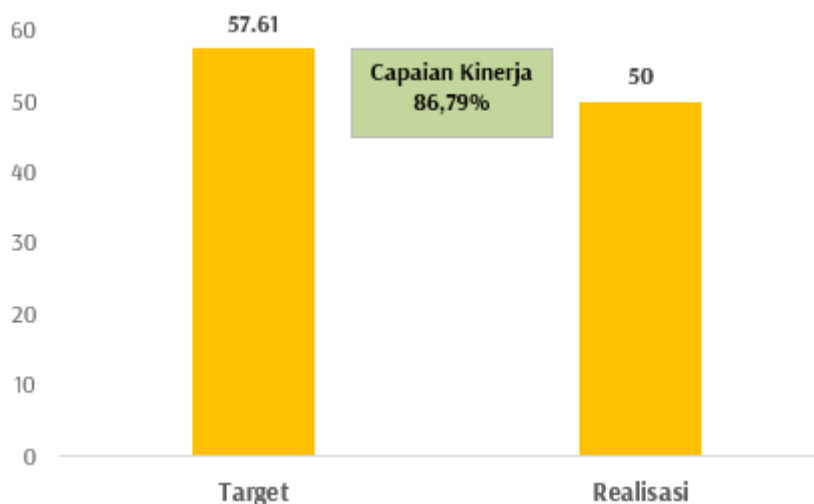
Dalam perhitungan IKK 1.2, ketuntasan SPM Pendidikan dibatasi pada Tuntas Pratama dan Tuntas Madya.

Hasil perhitungan indeks capaian SPM untuk Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2025 tersaji pada Tabel 3.4 berikut.

Tabel 3.3 Hasil IKK 1.2 BPMP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025

Nama Kabupaten/Kota	Indeks SPM		Flag
	2025	Label	
Prov. Sumatera Selatan	67,29	Tuntas Muda	0
Kab. Banyuasin	68,18	Tuntas Muda	0
Kab. Empat Lawang	65,37	Tuntas Muda	0
Kab. Lahat	67,18	Tuntas Muda	0
Kab. Muara Enim	70,57	Tuntas Pratama	1
Kab. Musi Banyuasin	71,81	Tuntas Pratama	1
Kab. Musi Rawas	70,43	Tuntas Pratama	1
Kab. Musi Rawas Utara	66,7	Tuntas Muda	0
Kab. Ogan Ilir	68,76	Tuntas Muda	0
Kab. Ogan Komering Ilir	71,48	Tuntas Pratama	1
Kab. Ogan Komering Ulu	64,65	Tuntas Muda	0
Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	60,11	Tuntas Muda	0
Kab. Ogan Komering Ulu Timur	78,12	Tuntas Pratama	1
Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	66,64	Tuntas Muda	0
Kota Lubuk Linggau	74,64	Tuntas Pratama	1
Kota Pagar Alam	71,43	Tuntas Pratama	1
Kota Palembang	81,42	Tuntas Madya	1
Kota Prabumulih	75,04	Tuntas Pratama	1
Jumlah (provinsi dan kabupaten/kota) yang memenuhi SPM pendidikan (Tuntas Pratama dan Tuntas Madya)			9
Jumlah prov/kab/kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan			18
Realisasi Capaian IKK 1.2			50,00%
Target Capaian IKK 1.2			57,61%
Capaian Kinerja IKK 1.2			86,79%

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan, terdapat 9 daerah (kab/kota) telah memenuhi SPM Pendidikan sesuai kategori yang telah ditentukan sehingga diperoleh realisasi IKK 1.2 sebesar 50,00%, realisasi ini masih belum mencapai target renstra dan perjanjian kinerja tahun 2025 sebesar 57,61% atau sebanyak 10 daerah (prov/kab/kota), dengan capaian kinerja IKK 1.2 sebesar 86,79%, seperti tersaji pada Gambar 3.4 berikut.



Gambar 3.4 Target dan Realisasi Kinerja IKK 1.2 BPMP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025

Program dan Kegiatan

Sesuai dengan tugas dan fungsi BPMP Provinsi Sumatera Selatan, melalui advokasi, pendampingan, monitoring, dan evaluasi kepada pemerintah daerah dan satuan pendidikan, program dan kegiatan yang dilakukan untuk mendukung pencapaian IKK 1.1 dan IKK 1.2 dimana setiap program dan kegiatan tersebut diidentifikasi keterlaksanaan dan ketercapaiannya melalui indikator objektif sebagai berikut.

Tabel 3.4 Target dan Realisasi Indikator Program Prioritas Tahun 2025

Program Prioritas		Target Indikator Protas 2025	Realisasi Indikator Protas 2025
A	Revitalisasi Sekolah		
1	Jumlah satuan pendidikan direvitalisasi	564	564
2	Jumlah Sekolah baru	1	1
B	Digitalisasi Pembelajaran		

Program Prioritas		Target Indikator Protas 2025	Realisasi Indikator Protas 2025
1	Jumlah satuan pendidikan dan sesuai dengan spesifikasi salur bantuan sarana digitalisasi pembelajaran	8.990	8.990
2	Persentase pendampingan multimoda pengelolaan bantuan sarana digitalisasi pembelajaran satuan pendidikan	1,5%	2%
C	Sistem Penerimaan Murid Baru		
1	Persentase Pemda sudah menetapkan petunjuk teknis (juknis) SPMB	100%	100%
2	Persentase Pemda Provinsi dan Pemda Kab/Kota melibatkan sekolah swasta dalam SPMB.	20%	22.22%
3	Persentase Pemda Provinsi dan Pemda Kab/Kota melaksanakan penandatanganan pakta integritas/ komitmen bersama atau deklarasi SPMB Bersih	40%	44,44%
D	Wajib Belajar 13 Tahun		
1	[Dit. PAUD] Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD tahun 2025	36,61%	36,61%
2	Persentase Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5-6 tahun pada tahun 2025	77,3%	77,3%
3	[Dit. SD] Persentase Kab/kota dengan Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 tahun di atas 99% sebesar 77,24%	77,24%	77,24%
4	[Dit. SD] Objektif 2B: Jumlah anak tidak sekolah yang mendapatkan layanan pendidikan di jenjang SD	4.320 orang	5.516 orang
5	[Dit. SMP] Objektif 3A: Persentase Kab/Kota dengan Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 tahun di atas 95%	100%	100%
6	[Dit. SMP] Objektif 3B: Jumlah anak tidak sekolah yang mendapatkan layanan pendidikan di jenjang SMP	6.829 orang	8.160 orang
7	[Dit. SMA] Objektif 4A: Persentase provinsi dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/SMLB/MA/Sederajat di atas 95%	100%	100%

Program Prioritas		Target Indikator Protas 2025	Realisasi Indikator Protas 2025
8	[Dit. SMA] Objektif 4B: Jumlah anak tidak sekolah yang mendapatkan layanan pendidikan di jenjang SMA	2.154 orang	4.026 orang
E	Penguatan Pendidikan karakter		
1	Jumlah satuan pendidikan menerapkan Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat (G7KAIH)	100%	100%
2	Persentase satuan pendidikan mendapatkan advokasi pelaksanaan G7KAIH	60%	87,83%
F	Makan Bergizi Gratis		
1	Jumlah satuan pendidikan penerima manfaat MBG teridentifikasi data kesiapan dan persiapannya menerima program MBG	260	7.896
2	Jumlah pemerintah daerah yang telah mendapatkan manfaat program MBG mendapatkan pendampingan	17	17
3	Jumlah data indikator evaluasi program MBG di satuan pendidikan teridentifikasi	14	14
G	Pembelajaran dan Penilaian		
1	Persentase satuan pendidikan penerima dana BOS Kinerja (Boskin) menerapkan Pembelajaran Mendalam	100%	117,33%
2	Persentase satuan pendidikan penerima dana BOS Kinerja (Boskin) menerapkan pembelajaran Koding dan Kecerdasan Artifisial (KA)	100%	99,36%
3	Persentase Dinas Pendidikan Prov/Kab/Kota mendukung upaya peningkatan kualitas pembelajaran (Pembelajaran Mendalam, Koding dan KA, peningkatan literasi)	50%	122%
4	Dinas Pendidikan Prov/Kab/Kota mendukung upaya peningkatan kualitas penilaian (seperti digitalisasi ijazah, TKA, ANBK, atau e-Rapor)	100%	100%
H	Penjaminan Mutu Pendidikan		
1	Satuan pendidikan dapat dipetakan sesuai 8 SNP	100%	100%

Program Prioritas		Target Indikator Protas 2025	Realisasi Indikator Protas 2025
2	Satuan pendidikan (Dasmen) memiliki capaian mutu sesuai SNP	31%	79,47%
3	Satuan pendidikan (Dasmen) menerapkan PMP	57%	96,99%
4	Pemda memiliki capaian mutu sesuai SPM (minimal Tuntas Madya)	5%	5,56%
5	Pemda mengalokasikan sumber daya sesuai capaian Rapor Pendidikan	79%	38,89%

Faktor Pendukung Keberhasilan

Faktor pendukung keberhasilan IKK 1.1. dan IKK 1.2 diantaranya:

1. Komitmen bersama pemangku kepentingan daerah untuk mendukung Program Prioritas Kemendikdasmen salah satunya diwujudkan dengan penandatanganan konsensus oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota.
2. Koordinasi rutin dengan pemerintah daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) di Sumatera Selatan untuk memastikan program prioritas selaras dengan kebijakan daerah.
3. Secara aktif mengawal Pemerintah Daerah dan satuan pendidikan dalam perencanaan berbasis data (PBD) untuk mencapai target SPM pendidikan di daerah masing-masing.
4. Mendorong satuan pendidikan di Provinsi Sumatera Selatan untuk melakukan refleksi diri melalui data yang akurat untuk meminimalkan bias dalam identifikasi masalah mutu pendidikan melalui ragam pendekatan yang asimetris.
5. Melakukan edukasi secara komprehensif dan berkelanjutan dalam memberikan pemahaman mendalam mengenai Standar Nasional Pendidikan (SNP) kepada pengawas sekolah/pendamping satuan pendidikan dan kepala sekolah agar mereka memiliki standar mutu yang sama.
6. Melakukan supervisi klinis melalui pemantauan langsung ke lapangan (monev) untuk melihat kendala riil, seperti implementasi kebijakan nasional termasuk pemetaan mutu pendidikan melalui pelaksanaan Asesmen Nasional.

Kendala dan Permasalahan

Kendala dan permasalahan yang ditemui dalam upaya pencapaian target kinerja BPMP Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut.

1. Adanya anomali dan integritas data berupa ketimpangan antara data administratif dengan realitas kualitas, misalnya anomali data pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik) di satuan pendidikan dan ketimpangan data capaian Akreditasi Sekolah dengan validasi yang tersaji dalam Rapor Pendidikan.
2. Kesenjangan kompetensi SDM Digital berupa belum meratanya kemampuan guru dan tenaga kependidikan dalam memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung layanan mutu.
3. Keterbatasan sumber daya sehingga pemenuhan Standar Nasional Pendidikan menjadi sangat terhambat.
4. Kapasitas fiskal dan penurunan Transfer ke Daerah (TKD) berdampak langsung pada perencanaan anggaran pendidikan di daerah yang berkontribusi terhadap alokasi program peningkatan mutu sebagai prioritas utama dibandingkan pembangunan fisik dan beban administratif yang tinggi.
5. Lemahnya sinergi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti penanganan isu Anak Tidak Sekolah (ATS) yang memerlukan data dari Dinas Kependudukan (Disdukcapil) dan intervensi dari Dinas Sosial.
6. Tantangan geografis dan disparitas wilayah, dimana Provinsi Sumatera Selatan memiliki karakteristik wilayah yang luas dengan medan perairan dan pegunungan. Hal ini menyebabkan biaya logistik dan pengawasan untuk menjangkau 17 Kabupaten/Kota menjadi sangat tinggi, sehingga intervensi mutu tidak selalu merata.
7. Masih terbatasnya sinergi dengan mitra eksternal (NGO, Perguruan Tinggi, dan Sektor Swasta) untuk ikut serta dalam pendampingan satuan pendidikan. Beban pendampingan saat ini masih sangat bertumpu pada personil BPMP dan Pengawas Sekolah yang jumlahnya terbatas.
8. Perubahan regulasi yang dinamis terkait penjaminan mutu seringkali memerlukan waktu sosialisasi yang lama hingga ke tingkat satuan pendidikan, menyebabkan jeda (gap) dalam implementasi kebijakan di lapangan.

Langkah Antisipasi

Langkah antisipasi yang dilaksanakan BPMP Provinsi Sumatera Selatan dalam upaya pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut.

1. Meningkatkan peran dalam melakukan fasilitasi, pendampingan, dan monitoring serta evaluasi kepada pemerintah daerah dan satuan pendidikan dalam pelaksanaan program prioritas Kemendikdasmen
2. Melakukan strategi penguatan tata kelola data melalui layanan konsultasi intensif (daring maupun luring) bagi operator sekolah dan kepala sekolah untuk melakukan validasi silang (cross-check) data Dapodik.
3. Melakukan verifikasi lapangan pada sampel sekolah yang menunjukkan anomali data yang ekstrem (misalnya, nilai sarpras tinggi namun kondisi fisik rusak) guna memastikan akurasi data administratif dan data faktual.
4. Menyelenggarakan pertemuan rutin dengan Bagian Perencanaan Dinas Pendidikan, Bappeda dan BPKAD untuk menyajikan profil pendidikan daerah dan memastikan indikator SPM masuk ke dalam Dokumen Perencanaan Daerah (RPJMD, Renstra, RKPD dan Renja).
5. Menginisiasi forum koordinasi yang melibatkan Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, dan Disdukcapil untuk penanganan isu spesifik seperti Anak Tidak Sekolah (ATS), Stunting, dan PAUD-HI yang menjadi salah satu indikator utama SPM.
6. Optimalisasi Pendamping Satuan Pendidikan sebagai "Co-Fasilitator" yang dilatih secara khusus untuk menjadi mitra operasional BPMP dalam mengawal kebijakan prioritas di tingkat satuan pendidikan.
7. Mengembangkan sistem informasi internal yang dapat memantau progres pemenuhan SNP dan SPM di seluruh wilayah Sumsel, misalnya melalui Dasbor Lintasan Musi dan Dasbor Kualitas Dapodik Provinsi Sumatera Selatan, yang juga dimanfaatkan seluruh pemangku kepentingan.
8. Penguatan peran dan *product knowledge* pegawai BPMP Provinsi Sumatera Selatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan memahami Kebijakan program prioritas Kemendikdasmen.

Strategi

Strategi ke depan yang dilakukan agar target indikator kinerja dapat tercapai antara lain:

1. Melakukan penyesuaian SIPD dengan Rapor Pendidikan dan mengawal proses perencanaan daerah secara spesifik mendukung kegiatan pemenuhan SPM.
2. Mendorong Pemda untuk melakukan tagging anggaran pada APBD yang secara eksplisit dialokasikan untuk pemenuhan indikator SPM Pendidikan (termasuk distribusi guru dan sarana prasarana).
3. Mendorong sekolah untuk menyesuaikan dokumen perencanaan sekolah (RKJM, RKT,

RKAS dan KSP) dengan Rapor Pendidikan dan Dokumen Perencanaan Daerah agar memberikan daya ungkit yang lebih besar dalam upaya perbaikan mutu pendidikan.

4. Mengembangkan platform supervisi yang memungkinkan Pendamping Satuan Pendidikan mengunggah bukti fisik pemenuhan SNP secara *real-time* yang dapat dipantau langsung oleh BPMP.
5. Membangun konsorsium dengan Mitra Eksternal dan sektor swasta untuk mendukung program pengabdian masyarakat yang fokus pada peningkatan literasi di daerah atau sekolah yang perlu intervensi khusus.
6. Mentransformasi peran Pengawas Sekolah menjadi pendamping (coach) sekaligus mitra operasional BPMP dalam melakukan pendampingan PBD (Perencanaan Berbasis Data) di sekolah binaannya.
7. Membangun Pusat Data Pendidikan Sumsel yang mengintegrasikan data Dapodik, Rapor Pendidikan, dan capaian SPM untuk memungkinkan BPMP memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemangku kepentingan secara instan dan akurat.
8. Menstandarisasi kompetensi tim internal BPMP dalam melakukan fasilitasi dan advokasi kepada seluruh pemangku kepentingan.

Sasaran Kegiatan 2



Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan

Sasaran Kegiatan 2 (SK 2) adalah meningkatnya tata kelola BPMP Provinsi Sumatera Selatan, untuk ketercapaian Sasaran Kegiatan tersebut didukung oleh 2 Indikator Kinerja Kegiatan yaitu: IKK 2.1. Capaian Nilai Kinerja Anggaran BPMP Provinsi Sumatera Selatan dengan kategori sangat baik, dan IKK2.2. Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BPMP Provinsi Sumatera Selatan minimal A.



IKK 2.1. Capaian Nilai Kinerja Anggaran BPMP Provinsi Sumatera Selatan dengan kategori sangat baik

Definisi operasional IKK 2.1 Capaian Nilai Kinerja Anggaran BPMP Provinsi Sumatera Selatan adalah nilai tertimbang dari Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).

Nilai Kinerja Anggaran BPMP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 adalah kinerja anggaran dalam PMK Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dievaluasi dalam rangka pengukuran, penilaian, dan analisis atas kinerja anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kinerja anggaran. Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran dilakukan atas 3 aspek yaitu aspek implementasi, aspek manfaat dan aspek konteks.

Realisasi IKK 2.1 Nilai Kinerja Anggaran BPMP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Nilai Kinerja Anggaran (NKA)} = [50\% \times \text{Nilai EKA}] + [50\% \times \text{Nilai IKPA}]$$

$$\text{Nilai Kinerja Anggaran (NKA)} = [50\% \times 100] + [50\% \times 97,57]$$

$$\text{Nilai Kinerja Anggaran (NKA)} = 98,74$$

Dari hasil perhitungan diperoleh Nilai Kinerja Anggaran sebesar “98,74” dengan kategori sangat baik, artinya realisasi IKK 2.1 telah mencapai target yang ditetapkan yaitu kategori sangat baik, sehingga capaian kinerja pada IKK 2.1 sebesar 100%, seperti tersaji pada tabel berikut.

**Tabel 3.5 Target, Realisasi dan Capaian Kinerja IKK 2.1
BPMP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025**

Indikator Kinerja Kegiatan	Target, Realisasi, Capaian Kinerja	Tahun
		2025
IKK 2.1 Capaian Nilai Kinerja Anggaran BPMP Provinsi Sumatera Selatan dengan Kategori Sangat Baik	Target	Sangat Baik
	Realisasi	Sangat Baik
	Capaian Kinerja	100%



**IKK 2.2 Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BPMP
Provinsi Sumatera Selatan minimal A**

Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BPMP Provinsi Sumatera Selatan adalah penilaian atas rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dimaksudkan sebagai acuan bagi unit kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam menerapkan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi kinerja internal.

Berdasarkan Perpres Nomor 29 tahun 2014, metode perhitungan SAKIP sebagai berikut:

$$\text{Nilai SAKIP} = [\text{Perencanaan Kinerja}] + [\text{Pengukuran kinerja}] + [\text{Pelaporan Kinerja}] + [\text{Evaluasi Kinerja}]$$

Hasil Nilai SAKIP diberikan predikat dan diinterpretasikan seperti ketentuan pada tabel berikut.

Tabel 3.6 Predikat dan Interpretasi Nilai SAKIP

Nilai	Predikat	Interpretasi
> 90 – 100	AA	Sangat Memuaskan
> 80 – 90	A	Memuaskan
> 70 – 80	BB	Sangat Baik
> 60 – 70	B	Baik
> 50 – 60	CC	Cukup (memadai)
> 30 – 50	C	Kurang
0 – 30	D	Sangat Kurang

Sumber: Definisi Operasional Indikator Kinerja oleh Sekretariat Jenderal Kemendikbudristek

Predikat SAKIP BPMP Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 dari hasil evaluasi Inspektorat Jenderal dan Biro Perencanaan Setditjen Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memperoleh nilai 90,00 **Predikat A**, dengan interpretasi **memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi dan sangat akuntabel**. Dengan predikat A berarti bahwa realisasi kinerja BPMP Provinsi Sumatera Selatan telah memenuhi target PK dan Renstra dengan persentase capaian kinerja IKK 2.2 sebesar 100%, seperti tersaji pada Tabel 3.7 berikut.

Tabel 3.7 Target, Realisasi dan Capaian Kinerja IKK 2.2 BPMP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025

Indikator Kinerja Kegiatan	Target, Realisasi, Capaian Kinerja	Tahun
		2025
IKK 2.2 Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BPMP Provinsi Sumatera Selatan minimal A	Target	A
	Realisasi	A
	Capaian Kinerja	100%

Nilai implementasi SAKIP BPMP Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 berdasarkan hasil evaluasi dari Inspektorat Jenderal dan Biro Perencanaan Setditjen Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dapat dilihat sebagai berikut.

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja 2025
1	Perencanaan Kinerja	30%	27
2	Pengukuran Kinerja	30%	27
3	Pelaporan Kinerja	15%	13,5
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	22,5
Nilai Akuntabilitas Kinerja		A	90

Faktor pendukung terpenuhinya capaian kinerja IKK 2.2 Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BPMP Provinsi Sumatera Selatan antara lain:

1. Pelaksanaan kegiatan penyusunan dokumen perencanaan yaitu renstra, dan perjanjian kinerja;
2. Pelaksanaan kegiatan penyusunan rencana kinerja tahunan dan rencana kerja aksi;

3. Pelaksanaan kegiatan reviu renstra;
4. Pelaksanaan kegiatan evaluasi pelaksanaan anggaran per triwulan;
5. Pelaksanaan kegiatan pengukuran kinerja per triwulan, dan;
6. Pelaksanaan kegiatan penyusunan laporan kinerja.

Selain itu strategi yang telah dilakukan untuk perbaikan berdasarkan beberapa faktor penyebab yang menjadi catatan di Tahun 2024 untuk meningkatkan pencapaian akuntabilitas kinerja BPMP Provinsi Sumatera Selatan antara lain:

1. Pengukuran Kinerja telah melampirkan matriks hasil capaian tahun sebelumnya dan analisis kebutuhan pegawai.
2. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja internal notulen telah menginformasikan hasil evaluasi periode sebelumnya dan masukan dari peserta rapat terkait perbaikan kinerja, dan mencantumkan hasil pendampingan dengan biro perencanaan.
3. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja internal rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah ditindak lanjuti, dan telah melampirkan hasil tindak lanjut berupa matriks hasil capaian tahun sebelumnya dan analisis kebutuhan pegawai.

Secara umum hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja BPMP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 telah memenuhi standar yang ditetapkan, yaitu:

a. Perencanaan Kinerja

Secara umum perencanaan Kinerja BPMP Provinsi Sumatera Selatan telah tersusun dengan baik dan memenuhi standar perencanaan yang ditetapkan dalam panduan, BPMP Provinsi Sumatera Selatan telah menyusun dokumen perencanaan kinerja berupa perencanaan kinerja jangka menengah, perencanaan jangka pendek, perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja lembaga dan perencanaan anggaran yang mempedomani regulasi teknis dan pedoman teknis yang telah ditetapkan.

b. Pengukuran Kinerja

Secara umum pengukuran Kinerja BPMP Provinsi Sumatera Selatan telah tersusun dengan baik dan memenuhi standar pengukuran yang ditetapkan dalam panduan, telah dilengkapi dokumen rapat/koordinasi secara rutin baik formal maupun informal, pelibatan semua unsur mulai dari pimpinan sampai dengan pihak yang terkait langsung, menggunakan beberapa instrumen aplikasi baik yang sudah diimplementasikan secara terpusat maupun secara mandiri, penetapan kebijakan baik dalam fungsi reward dan punishment, bahkan

juga dalam kerangka penyesuaian-penyesuaian akselerasi pelaksanaan kegiatan dan efisiensi anggaran.

c. Pelaporan Kinerja

Secara umum pelaporan Kinerja BPMP Provinsi Sumatera Selatan telah tersusun dengan baik dan memenuhi standar pelaporan yang ditetapkan dalam panduan, telah dilakukan reviu secara intensif untuk menguji objektivitas dan akuntabilitas pelaporan. Pelaporan Kinerja juga telah dilaporkan secara tepat waktu dalam sistem yang telah ditetapkan dan dipublikasikan.

d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Secara umum evaluasi Kinerja BPMP Provinsi Sumatera Selatan telah tersusun dengan baik dan memenuhi standar evaluasi yang ditetapkan dalam panduan, telah dilakukan evaluasi internal secara komprehensif dengan mempedomani pedoman teknis yang telah ditetapkan, dan dalam kerangka evaluasi teknis ini dilakukan oleh SDM yang sudah tersertifikasi dalam melaksanakan evaluasi internal, namun baru empat orang yang telah memiliki sertifikat dari 25 Tim Evaluasi.

Berdasarkan hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja BPMP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 di atas maka dikeluarkan rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti oleh BPMP Provinsi Sumatera Selatan:

a. Perencanaan Kinerja

Agar dokumen perencanaan kinerja tersebut ditingkatkan dan dimanfaatkan secara konsisten dan berkesinambungan dalam rangka mewujudkan capaian kinerja yang telah ditetapkan dengan proses implementasi perencanaan menyesuaikan dinamika dalam mencapai kinerja lembaga yang dinamis

b. Pengukuran Kinerja

Agar lebih ditingkatkan dan menjaga konsistensi dalam melaksanakan pengukuran kinerja dengan melakukan penyesuaian dan penyesuaian strategi untuk mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien.

c. Pelaporan Kinerja

Agar lebih ditingkatkan dan menjaga konsistensi dalam pelaporan kinerja dengan melakukan penyesuaian strategi dalam upaya perbaikan dan penyempurnaan penyajian informasi kinerja pada dokumen laporan kinerja lembaga.

d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Agar lebih ditingkatkan dan secara berkala melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah (AKIP) sehingga memberikan dampak dalam efektifitas dan efisiensi kinerja lembaga, dan bagi tim evaluasi yang belum memiliki sertifikat agar diusulkan untuk diikutkan Diklat.



B. Capaian Anggaran

B.1 Realisasi Anggaran

Pagu Pagu anggaran BPMP Provinsi Sumatera Selatan dalam DIPA tahun 2025 sebesar Rp 25.008.359.000 dengan blokir Rp1.889.834.000 sehingga pagu yang bisa digunakan sebesar Rp23.118.525.000, dari pagu anggaran tersebut berhasil diselesaikan sebesar Rp22.131.375.933 dengan persentase daya serap sebesar 99,13%. Dengan total sisa anggaran sebesar Rp987.149.067.

Tabel 3.8 Realisasi Anggaran BPMP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025

URAIAN	TOTAL				BLOKIR
	PAGU	REALISASI	%	SISA	
BPMP Provinsi Sumatera Selatan	Rp25.008.359.000	Rp 22,917,600,448	99,13 %	Rp200.924.552	Rp1.889.834.000
(7605.QDB) Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	Rp7.228.885.000	Rp5.325.007.295	99,74 %	Rp14.043.705	Rp1.889.834.000
(7606.EBA) Layanan Dukungan Manajemen Internal	Rp17.727.834.000	Rp17.540.953.153	98,95 %	Rp186.880.847	0
(7606.EBB) Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Rp51.640.000	Rp51.640.000	100 %	0	0



Kinerja Lain-lain



Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi yang telah dilaksanakan pada BPMP Provinsi Sumatera Selatan adalah bagian dari upaya untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Reformasi birokrasi berfokus pada perbaikan layanan publik melalui digitalisasi dan penyederhanaan proses layanan. Adapun langkah-langkah kerja yang telah dilakukan pada BPMP Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi di tingkat Kementerian adalah sebagai berikut:

- a. Perbaikan Tata Kelola Organisasi
 - Digitalisasi Proses Kerja: Mengimplementasikan penggunaan aplikasi dan sistem informasi dalam manajemen administrasi dan layanan.
 - Penguatan Manajemen Risiko: Melakukan identifikasi dan mitigasi risiko untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih akuntabel.
 - Penyusunan SOP yang Efektif: Menyusun dan memperbarui Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk memastikan keseragaman dalam pelaksanaan tugas.
- b. Peningkatan Kualitas Layanan Publik
 - Optimalisasi Layanan Terpadu: Mengembangkan layanan publik terpadu agar lebih mudah diakses oleh pemangku kepentingan pendidikan.
 - Survei Kepuasan Masyarakat: Melaksanakan survei untuk menilai kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan dan membuat tindak lanjut perbaikan.
 - Peningkatan Pelayanan Prima: Mengadakan pelatihan pelayanan prima untuk petugas front office, satpam, dan bagian administrasi
- c. Penguatan Integritas dan Anti-Korupsi
 - Sosialisasi Anti-Korupsi: Mengadakan sosialisasi dan edukasi untuk membangun budaya anti-korupsi di lingkungan BPMP.
 - Pembentukan Agen Perubahan: Menunjuk dan membina agen perubahan sebagai teladan dalam implementasi integritas dan reformasi birokrasi.
 - Penerapan Whistleblowing System: Memberikan sarana bagi pegawai untuk melaporkan dugaan pelanggaran secara aman.
- d. Penguatan SDM dan Kompetensi Pegawai

- Pelatihan Berbasis Kompetensi: Menyelenggarakan pelatihan dan workshop untuk meningkatkan kompetensi pegawai.
 - Pengembangan Budaya Kerja ASN: Menginternalisasi nilai-nilai BERAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif), dan RAMAH (Responsif, Akuntabel, Melayani, Adaptif, dan Harmonis).
- e. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja
- Laporan Kinerja Berkala: Menyusun laporan kinerja secara berkala sebagai bentuk pertanggungjawaban publik.
 - Monitoring dan Evaluasi (Monev): Melakukan monev rutin terhadap pelaksanaan program dan kegiatan untuk memastikan efektivitas.
- f. Kolaborasi dan Kemitraan
- Sinergi dengan Pemangku Kepentingan: Melibatkan Dinas Pendidikan, sekolah, dan mitra pembangunan dalam pelaksanaan program prioritas.
 - Melalui upaya ini, diharapkan agar birokrasi lebih efisien, berintegritas, dan mampu mendukung program-program pendidikan yang berdampak luas bagi masyarakat.

C.2 Inovasi

Dalam era perubahan yang serba cepat dan dinamis seperti saat ini, inovasi bukan lagi sekadar pilihan, melainkan suatu keharusan. Inovasi hadir sebagai solusi kreatif untuk menjawab berbagai tantangan yang muncul di berbagai bidang, baik dalam pendidikan, teknologi, pelayanan publik, maupun kehidupan sosial. Melalui inovasi, kita dapat menemukan cara-cara baru untuk meningkatkan kualitas layanan, efisiensi proses, dan hasil yang lebih optimal.

Inovasi lahir dari pemikiran yang berani untuk keluar dari zona nyaman dan menciptakan perubahan positif. Inovasi tidak selalu tentang menciptakan sesuatu yang sepenuhnya baru, tetapi juga bagaimana kita dapat mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk memberikan dampak yang lebih besar dan bermakna. Dengan semangat inovasi, kita didorong untuk terus belajar, beradaptasi, dan merancang strategi yang relevan dengan kebutuhan zaman.

Pada tahun 2025, BPMP Provinsi Sumatera Selatan melakukan inovasi yang fokus kepada peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia, pendampingan serta advokasi kepada Pemerintah Daerah yang dilakukan dengan berbagai bentuk kegiatan baik secara internal maupun eksternal, seperti tersaji pada gambar berikut.



Gambar 3.5 Inovasi Pendukung Pelayanan Prima dan Pencapaian Kinerja Utama

Inovasi yang ditujukan kepada internal BPMP Provinsi Sumatera Selatan:

1. Apel Senin BERPIJAR (Bersemangat Pagi Belajar)

Senin BERPIJAR adalah sebuah forum rutin yang diadakan setiap dua minggu sekali pada hari Senin. Kegiatan ini dirancang sebagai wadah pengimbasan pelatihan, sosialisasi kebijakan, serta penyampaian informasi kelembagaan dan isu-isu penting lainnya yang memerlukan perhatian khusus. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan seluruh pegawai dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai kebijakan Merdeka Belajar, serta terlibat aktif dalam diskusi dan pengembangan kapasitas profesional.

Selain itu, Senin BERPIJAR juga bertujuan untuk memperkuat jejaring dan kolaborasi antar pegawai, sehingga tercipta sinergi yang positif dalam upaya peningkatan mutu pendidikan. Melalui berbagai sesi sosialisasi, diskusi, dan pelatihan, peserta akan memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru yang dapat diaplikasikan dalam praktik pendidikan sehari-hari, dengan harapan akan ada beberapa capaian yaitu:

- a. Tersampaikan informasi kelembagaan yang perlu diketahui oleh seluruh pegawai.
- b. Adanya penguatan kapasitas dan sosialisasi terkait berbagai topik yang dibutuhkan pegawai atau lembaga.
- c. Adanya penguatan terkait *attitude, skill, and performance* pegawai.

2. PATIN (Rapat Rutin)

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab di lingkungan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Sumatera Selatan, diperlukan suatu mekanisme koordinasi yang terstruktur dan rutin. Kegiatan PATIN (Rapat Rutin) yang diadakan setiap hari Senin hadir sebagai sarana untuk memastikan bahwa setiap

program dan kegiatan yang direncanakan dapat berjalan sesuai dengan jadwal, serta untuk melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan.

Rapat Rutin juga menjadi forum untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan isu-isu yang memerlukan penanganan cepat, sehingga dapat diambil langkah-langkah strategis yang tepat waktu. Dalam rapat ini, Kepala BPMP Provinsi Sumatera Selatan memimpin langsung diskusi untuk memastikan seluruh peserta memahami dan berkomitmen terhadap setiap keputusan yang diambil.

Rapat Rutin ini menjadi momen berkumpul bersama antar Tim Kerja dan Sub Bagian Umum dan Kepala BPMP untuk melakukan:

- a. Perencanaan Kegiatan: Setiap bagian di BPMP Provinsi Sumatera Selatan dapat memaparkan rencana kegiatan mereka untuk minggu berjalan, sehingga semua pegawai memiliki pemahaman yang jelas tentang apa yang harus dicapai.
 - b. Reviu dan Evaluasi: Dengan melakukan review terhadap kegiatan yang telah dijalankan, setiap bagian dapat mengidentifikasi keberhasilan serta kendala yang dihadapi, dan belajar dari pengalaman tersebut untuk perbaikan di masa mendatang.
 - c. Eskalasi Isu: membahas isu-isu yang muncul dan memerlukan penanganan cepat dapat diidentifikasi dan diatasi dengan segera, melalui koordinasi yang baik dan pengambilan keputusan yang cepat.
 - d. Koordinasi dan Kolaborasi: Rapat ini memungkinkan terjalinnya komunikasi yang baik antar bagian, sehingga dapat tercipta sinergi dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.
3. Komunitas Belajar CERDAS (Cerita dan Diskusi Asik)

Dalam rangka mendorong transformasi UPT, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Sumatera Selatan berkomitmen untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui berbagai inisiatif strategis. Salah satu upaya penting yang dilakukan adalah KOMUNITAS BELAJAR CERDAS (Cerita dan Diskusi Asik) yang bertujuan untuk memperkuat kolaborasi dan sinergi antar Staf Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.

Komunitas belajar merupakan salah satu strategi yang efektif dalam menciptakan lingkungan kerja yang interaktif, kolaboratif, dan berkelanjutan. Dalam komunitas belajar, seluruh anggota tim kerja dapat saling berbagi pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman untuk mendorong peningkatan mutu pelayanan secara keseluruhan. Panduan ini dirancang untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan KOMUNITAS BELAJAR CERDAS (Cerita dan Diskusi Asik), hal ini karena dalam era transformasi digital dan perkembangan ilmu

pengetahuan yang pesat, maka pengetahuan memiliki peran sentral dalam membentuk sumber daya manusia yang kompeten agar siap menghadapi tantangan global.

Dalam praktiknya, komunitas belajar dapat diwujudkan dalam bentuk kelompok diskusi, forum daring, program mentoring di mana anggota secara aktif terlibat dalam proses pembelajaran. Komunitas Belajar memiliki fasilitator atau koordinator yang membantu memandu diskusi, menyediakan sumber daya, dan memastikan bahwa tujuan pembelajaran tercapai.

Diharapkan dengan adanya KOMUNITAS BELAJAR CERDAS (Cerita dan Diskusi Asik) ini, dapat menjadi wadah/sarana bagi seluruh SDM Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan untuk terus meningkatkan dan mengembangkan kapasitas diri serta kegiatan KOMUNITAS BELAJAR CERDAS (Cerita dan Diskusi Asik) menjadi suatu rutinitas yang melembaga di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.

4. Jumat Kelakar (Juker)

Jumat Kelakar (Juker) merupakan wahana belajar yang dirancang khusus untuk pegawai dengan pendekatan Andragogi, *Experiential Learning*, *Participatory Learning* yang kasual dan menyenangkan. Kegiatan ini tidak hanya berfokus pada peningkatan keterampilan teknis, tetapi juga mencakup pengembangan sikap dan kompetensi yang relevan dengan dunia pendidikan. Jumat Kelakar tidak hanya sekadar program skill, knowledge, dan attitude tetapi juga menjadi sarana untuk membangun profesionalisme dan ikatan kekeluargaan yang lebih kuat di antara pegawai melalui berbagai aktivitas bermain dan belajar yang menyenangkan. Dengan melibatkan narasumber yang berkompeten dan materi yang relevan, Jumat Kelakar berkomitmen untuk memberikan pengalaman belajar yang berharga dan berdampak positif bagi seluruh peserta.

Tujuan dari Jumat Kelakar (Juker):

- a. Meningkatkan keterampilan dan kompetensi pegawai di berbagai aspek pendidikan.
- b. Membangun sikap positif dan proaktif dalam lingkungan kerja.
- c. Menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan interaktif.
- d. Mendorong kolaborasi dan komunikasi yang efektif di antara pegawai

Hasil yang diharapkan:

- a. Meningkatnya keterampilan dan kompetensi pegawai di berbagai aspek pendidikan.
- b. Terbangunnya sikap positif dan proaktif dalam lingkungan kerja.
- c. Terciptanya suasana belajar yang menyenangkan dan interaktif.
- d. Mendorong kolaborasi dan komunikasi yang efektif di antara pegawai
- e. Penandatanganan Konsensus dengan Pemerintah Daerah/Dinas Pendidikan

5. Mang Oleh

Mang Oleh atau Mari Ngelapor Oleh-oleh merupakan inovasi internal BPMP Provinsi Sumatera Selatan untuk pengendalian gratifikasi dan penguatan nilai-nilai integritas kejujuran pegawai dalam melaksanakan tugas kedinasan serta implementasi tata nilai (core values) Aparatur Sipil Negara (ASN) yang Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif (BerAKHLAK).

Inovasi yang ditujukan kepada internal BPMP Provinsi Sumatera Selatan

1. Konsensus

Penandatanganan konsensus menjadi forum untuk mengidentifikasi dan menyelaraskan kebijakan nasional dengan kebijakan daerah serta membentuk kesepakatan bersama terhadap langkah-langkah strategis untuk mengimplementasikan program peningkatan mutu pendidikan.

Tujuan dari penandatanganan konsensus ini adalah untuk:

- a. Mendiskusikan kendala dan tantangan setiap pemerintah daerah dalam melaksanakan upaya peningkatan mutu pendidikan di wilayah kerjanya.
- b. Melakukan review terhadap seluruh hasil identifikasi dan kondisi mutu pendidikan di setiap pemerintah daerah.
- c. Mengidentifikasi dan mengeskalisasi isu-isu yang memerlukan penanganan cepat dan memerlukan kerja sama lintas bidang/lintas instansi.
- d. Memastikan koordinasi yang baik antar instansi dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta peran masing-masing.
- e. Menyelaraskan program peningkatan mutu pendidikan lintas instansi.
- f. Membentuk kesepakatan bersama terhadap langkah-langkah strategis dan penyesuaian kebijakan nasional dengan kebijakan daerah dan menyinergikan upaya-upaya bersama dalam peningkatan mutu pendidikan.

2. Serasan (Sarasehan, Eksplorasi, Apresiasi, dan refleksi santai)

Serasan merupakan akronim dari Sarasehan, Eksplorasi, apResiAsi, dan reflekSi sANTai, Serasan menjadi inisiasi pendekatan advokasi dalam memastikan implementasi Program Prioritas oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Serasan menjadi forum untuk berdialog, berdiskusi dan mengidentifikasi praktik baik, keberhasilan dan tantangan dalam implementasi Program Prioritas, serta refleksi dengan pendekatan yang cair dalam prosesnya.

Strategi advokasi “Serasan” juga berfungsi sebagai media untuk memberikan apresiasi terhadap berbagai praktik baik yang telah dilakukan oleh berbagai pemangku kepentingan dalam mencapai tujuan dan target objektif implementasi program prioritas. Dengan mengakui dan menghargai upaya yang telah dilakukan oleh pemangku kepentingan, diharapkan tumbuh motivasi dan semangat yang lebih tinggi untuk terus mendukung implementasi program prioritas Kemendikdasmen.

Selanjutnya, refleksi mendalam terhadap hasil dialog yang dilakukan dalam advokasi akan menjadi dasar bagi perbaikan kebijakan dan praktik pendidikan di masa depan. Berdasar kondisi tersebut di atas, kegiatan Advokasi “Serasan” diharapkan dapat menjadi langkah penting dalam memperkuat sinergi dan kolaborasi antara UPT dan seluruh pemangku kepentingan pendidikan dalam menciptakan sekolah yang kita cita-citakan.

Tujuan kegiatan Advokasi ‘Serasan’ yaitu:

- 1) Meningkatkan Sinergi dan Kolaborasi
Membangun kerjasama yang lebih erat antara Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) dan berbagai pemangku kepentingan, termasuk dinas pendidikan, sekolah, guru, dan komunitas pendidikan, dalam upaya memperkuat pelaksanaan Kebijakan Program Prioritas.
- 2) Mengidentifikasi Tantangan dalam Implementasi Kebijakan Program Prioritas
Mengumpulkan masukan langsung dari berbagai pemangku kepentingan pendidikan untuk memahami tantangan yang dihadapi dalam implementasi Kebijakan Program Prioritas di lapangan.
- 3) Mengeksplorasi Praktik-Praktik Inovatif dan Solusi Efektif yang telah dilakukan Pemerintah Daerah/Satuan Pendidikan
Menggali dan mendokumentasikan berbagai praktik inovatif dan solusi yang telah diterapkan oleh sekolah, guru, dan satuan pendidikan lain dalam mendukung pelaksanaan program prioritas.
- 4) Memberikan Apresiasi terhadap Praktik-Praktik Baik
Mengakui dan menghargai upaya dan inovasi yang telah dilakukan oleh para peserta dalam mengimplementasikan program prioritas, dengan tujuan untuk memotivasi dan mendorong replikasi praktik baik di berbagai konteks pendidikan.
- 5) Mendorong Refleksi dan Pembelajaran Berkelanjutan
Mengajak peserta untuk melakukan refleksi mendalam terhadap praktik-praktik dan kebijakan pendidikan yang telah diterapkan, serta mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki atau dikembangkan lebih lanjut.

6) Menyusun Rekomendasi Kebijakan yang Berbasis Data

Menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berdasarkan data dan masukan yang diperoleh selama kegiatan, untuk membantu memperbaiki dan menyempurnakan implementasi Kebijakan program prioritas di masa depan.

7) Memperkuat Kepercayaan dan Rasa Memiliki Terhadap Kebijakan

Meningkatkan kepercayaan dan rasa memiliki (*ownership*) di kalangan pemangku kepentingan terhadap kebijakan program prioritas, dengan memastikan bahwa suara mereka didengar dan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan

3. Pikat Bidar (Pendampingan Melekat Bimbingan Dalam Jaringan)

Program prioritas yang digulirkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah merupakan langkah strategis untuk mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua dengan dukungan partisipasi semesta dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Sejalan dengan visi tersebut, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Sumatera Selatan memiliki peran krusial dalam memastikan kebijakan ini diimplementasikan dengan efektif di tingkat daerah.

Pikat Bidar merupakan salah satu upaya untuk memastikan keberhasilan implementasi program prioritas di satuan pendidikan. Melalui pendekatan ini, BPMP mendampingi pemangku kepentingan secara langsung dan berkelanjutan, termasuk dinas pendidikan, pengawas sekolah, kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan. Tujuannya adalah untuk memberikan dukungan, solusi, dan advokasi sehingga kebijakan dapat dipahami dan diimplementasikan secara optimal.

Kegiatan pendampingan melekat ini dirancang untuk:

- a. Membangun wawasan informasi pengetahuan dan pemahaman pemangku kepentingan/ekosistem pendidikan tentang prinsip, tujuan, dan mekanisme program prioritas Kemendikdasmen.
- b. Memberikan dukungan teknis dengan membantu pemangku kepentingan dalam menerjemahkan kebijakan ke dalam praktik nyata di lapangan.
- c. Mengawal pelaksanaan dengan melakukan identifikasi tantangan dan hambatan di lapangan serta memberikan rekomendasi solutif secara cepat dan tepat.
- d. Mendorong Kolaborasi dengan memperkuat sinergi antara BPMP, dinas pendidikan, dan satuan pendidikan dalam mendukung kebijakan program prioritas.

e.

C.3 Penghargaan

Pada tahun 2025, BPMP Provinsi Sumatera Selatan mendapatkan penghargaan atas keberhasilan dalam melaksanakan beberapa kegiatan, diantaranya:

1. Peringkat II Pengguna Digipay terbaik periode semester I Tahun Anggaran 2025 Kategori Uang Persediaan (UP) sedang lingkup KPPN Palembang



2. Peringkat III Pengguna Digipay terbaik periode semester III Tahun Anggaran 2025 Kategori Uang Persediaan (UP) sedang lingkup KPPN Palembang



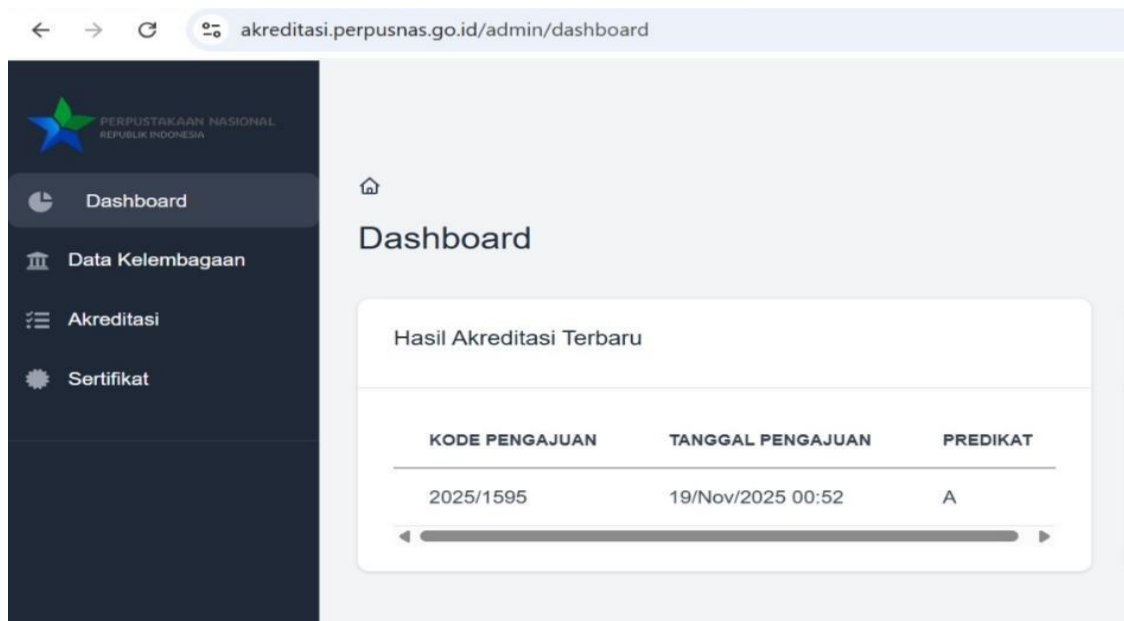
3. Penghargaan dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atas keberhasilan membangun unit kerja berpredikat Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (ZIWBK) Tahun 2025



4. Penghargaan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai UPT Transpormator Kolaborasi dan Dampak Berkelanjutan pada Implementasi Program Makanan Bergizi Gratis di Satuan Pendidikan Tahun 2025



5. Penghargaan dari Perpustakaan Nasional atas keberhasilan reakreditasi Perpustakaan Khusus dengan predikat A



Selain penghargaan yang tercantum di atas, BPMP Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2025 juga menerima penghargaan dari pemerintah daerah berikut.

**Tabel 3.9 Piagam Penghargaan
BPMP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025**

NO	Nama Piagam	Untuk	Dari	Tanggal	Penanda Tangan
1	Piagam Penghargaan Kolaborasi dan dukungan penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan Kota Palembang tahun 2025 dengan pencapaian Indek SPM pendidikan Tuntas Madya	BPMP Provinsi Sumatera Selatan	Wali Kota Palembang (Ratu Dewa)	28 Mei 2025	Ratu Dewa
2	Piagam Penghargaan Sebagai Tokoh Inspiratif Peningkatan dan Penjaminan Mutu Pendidikan dalam capaian Indeks SPM Pendidikan Tuntas Madya kota Palembang	Kepala BPMP Provinsi Sumatera Selatan	Wali Kota Palembang (Ratu Dewa)	28 Mei 2025	Ratu Dewa
2	Piagam Penghargaan rangka Kolaboarasi bersama Penjaminan Mutu Pendidikan di Kabupaten Bersama di kabupaten Banyuasin	BPMP Provinsi Sumatera Selatan	Pemerintah Kabupaten MUBA	28 April 2025	H. M. Toha
3	Piagam Penghargaan Kolaboarasi bersama dalam Penjaminan dan Peningkatan Mutu Pendidikan di Kota Lubuk Linggau	BPMP Provinsi Sumatera Selatan	Pemerintah Kota Lubuklinggau	10 Maret 2025	H. Racmad Hidayat
NO	Nama Piagam	Untuk	Dari	Tanggal	Penanda Tangan

4	Piagam Penghargaan dalam Rangka Kolaborasi bersama dalam Penjaminan dan Peningkatan Mutu Pendidikan	BPMP Provinsi Sumatera Selatan	Pemerintah Kabupaten Musirawas Utara	12 Pebruari 2025	H. Devi Suhartoni
5	Piagam Penghargaan Sebagai Lembaga Inspiratif, menginisiasi kolaborasi Penjaminan dan Peningkatan Mutu Pendidikan di Kab. Musi Rawas	BPMP Provinsi Sumatera Selatan	Pemerintah Kabupaten Musi Rawas	Maret 2025	Hj. Ratna Machmud
6	Piagam Penghargaan Sebagai Tokoh Inspiratif dalam meningkatkan kualitas dan Mutu Pendidikan	Kepala BPMP Provinsi Sumatera Selatan	Pemerintah Kabupaten Banyuasin	27 Mei 2025	Dr. H. Askolani, S.H., MH.
7	Piagam Penghargaan Atas Kerjasama dalam Penjaminan, Percepatan dan Peningkatan Mutu Pendidikan di Kabupaten Banyuasin	BPMP Provinsi Sumatera Selatan	Pemerintah Kabupaten Banyuasin	27 Mei 2025	Dr. H. Askolani, S.H., MH.

C.4 Program Crosscutting/Collaborative

Program *crosscutting/collaborative* merupakan salah satu upaya dalam rangka penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan melalui sinergi dan kolaborasi BPMP Provinsi Sumatera Selatan dengan berbagai pihak dalam ekosistem pendidikan terutamanya Bappeda dan Dinas Pendidikan. Inisiasi *crosscutting* muncul dari pihak eksternal yang memiliki kepedulian bersama dalam meningkatkan kualitas pendidikan di wilayahnya terutama terhadap implementasi Kebijakan Program Prioritas Kemendikdasmen.

Pada tahun 2025 BPMP Provinsi Sumatera Selatan melakukan beberapa program *crosscutting/collaborative* seperti yang dapat dilihat pada Tabel 3.10 berikut.

Tabel 3.10
Program Crosscutting/Collaborative BPMP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025

NO	KAB/KOTA	NAMA KEGIATAN	PELAKSANAAN	TEMPAT
1	Kota Palembang	Rapat Koordinasi Program Prioritas Kemendikdasmen (inisiasi Disdik dan BPMP)	9 Januari 2025	Ruang rapat Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang
		Rapat Pelaksanaan SPMB dan penandatanganan Komitmen Bersama (undangan Walikota Palembang)	28 April 2025	Aula Dinas Pendidikan Kota Palembang

NO	KAB/KOTA	NAMA KEGIATAN	PELAKSANAAN	TEMPAT
		<i>Groundbreaking</i> dalam Rangkaian Hari Pendidikan Nasional (Direktorat Sekolah Dasar)	2 Mei 2025	SD Xaverius 4 Kota Palembang
		Sosialisasi Pendampingan Pendidikan Layanan Khusus bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Se-Kota Palembang Tahun 2025	26 Mei 2025	Aula Dinas Pendidikan Kota Palembang
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen bagi PAUD Kota Palembang Tahun Anggaran 2025	4 Juni 2025	The Alts Hotel Palembang
		Pengembang Karir PTK dalam Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Jenjang SMP	23 Juni 2025	Hotel Grand Duta Palembang
		Edukasi "Menuju Sekolah Berbasis Digital dengan Google"	24 Juli 2025	Hotel 101 Palembang
		Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan melalui Platform Rapor Pendidikan bagi Satuan Pendidikan Jenjang SMP Kota Palembang Tahun 2025	25 September 2025	Hotel 101 Palembang
		Sosialisasi kurikulum Merdeka melalui Pembelajaran Mendalam PAUD Kota Palembang	30 September 2025	The Zuri Hotel Palembang
		Bimbingan Teknis PAUD HI	6-7 Oktober 2025	Gedung PBG Sekayu
		Bimbingan Teknis Penguatan Kapasitas Kepala SMP dalam Mewujudkan Pembelajaran Yang Agility dan Responsif Terhadap Perubahan Menuju Sekolah Yang Dicitakan	22 Oktober 2025	Hotel Aston Palembang

NO	KAB/KOTA	NAMA KEGIATAN	PELAKSANAAN	TEMPAT
		Workshop Penerapan Sekolah Inklusi dan Penerapan di Sekolah	27-28 Oktober 2025	SMKN 2 Palembang
		Sosialisasi penggunaan aplikasi bidang pendidikan untuk meningkatkan kapasitas pendidikan PAUD	1 Desember 2025	The Alts Hotel Palembang
		Pendampingan Program Digitalisasi Pembelajaran	14-16 Des 2025	Kota Palembang
		Koordinasi Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Daerah	23 Desember 2025	Ruang Rapat Bina Praja Lantai II Kantor Gubernur Sumatera Selatan
		Advokasi dan KIE Inisiasi Pembentukan TAMASYA tingkat Provinsi Tahun 2025	11 Desember 2025	Beston Hotel Palembang
2	Kabupaten Ogan Komering Ulu	Bimbingan Teknis Penguatan Pengelolaan E-Ijazah untuk Jalur Nonformal/ Kesetaraan Se-Kabupaten OKU Tahun 2025	28 Mei 2025	Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu
		Koordinasi Program Wajar 13 Tahun dan Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) Kabupaten OKU Tahun 2025	22 Desember 2025	Aula Hotel Grand Kemuning Baturaja
3	Kota Pagaram	Sosialisasi Asesmen Bakat Minat SMP	26-27 November 2025	Hotel Favour Pagaram Agung Pagaram
4	Kabupaten Musi Rawas	Sosialisasi Konten Digital (Pembuatan Website Satuan Pendidikan Tahun 2025)	03 - 05 November 2025	Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas
5	Kabupaten Lahat	Pelatihan Pengembangan Kurikulum Kesetaraan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan NonFormal	22 Desember 2025	Hotel Cendrawasih, Kabupaten Lahat
6	Kabupaten Empat Lawang	Koordinasi menuju PAUD HI	17 Desember 2025	Hotel Khalisa Tebing Tinggi

NO	KAB/KOTA	NAMA KEGIATAN	PELAKSANAAN	TEMPAT
7	Kabupaten Muara Enim	Bimbingan Teknis Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) Pendidikan Kesetaraan	22-24 Sept 2025	Hotel Griya Serasan Sekundang
		Bimbingan Teknis (Bimtek) Operator Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) Sekolah Menengah Pertama	9-10 Oktober 2025	Hotel Griya Serasan Sekundang
		Bimbingan Teknis (Bimtek) Penilaian Hasil Belajar siswa bagi guru Sekolah Menengah Pertama	6-8 November 2025	Hotel Griya Serasan Sekundang
		Bimtek Pemberian Layanan dan Pendampingan bagi Satuan Pendidikan untuk Pencegahan Perundungan, Kekerasan, dan Intoleransi	10-11 November 2025	Hotel Griya Serasan Sekundang
		Pelatihan Pengembangan Konten Pembelajaran melalui PMM bagi Guru SMP	6-10 Desember 2025	Hotel Griya Serasan Sekundang
8	Kabupaten OKU Timur	Pelatihan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) Jenjang Pendidikan Kesetaraan	29 April 2026	Hotel Ardan Belitang
9	Kota Prabumulih	Sosialisasi dan Monitoring Uji Kesetaraan Paket A, B dan C Berbasis Komputer	24 Juni 2026	Hotel Fave Prabumulih

BPMP Provinsi Sumatera Selatan melakukan program *crosscutting/collaborative* dalam upaya mempercepat transformasi pendidikan, kolaborasi yang kuat antara Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) dan Pemerintah Daerah (Pemda) menjadi kunci keberhasilan implementasi program prioritas Kemendikdasmen.

BPMP sebagai perpanjangan tangan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah di daerah, memiliki peran strategis untuk mendampingi Pemda dalam memastikan setiap kebijakan dan program pendidikan dapat terlaksana secara efektif dan berdampak nyata. Dengan menjalin kemitraan yang solid, BPMP dan Pemda dapat mengidentifikasi tantangan bersama, merumuskan solusi, dan merancang langkah-langkah inovatif untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Dalam rangka mendukung program prioritas Kemendikbudristek, kolaborasi antara Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) dan Pemerintah Daerah (Pemda) melibatkan berbagai pemangku kepentingan pendidikan maupun pemangku kepentingan lainnya di luar pendidikan. Setiap pihak memiliki peran strategis untuk memastikan kebijakan dan program pendidikan dapat terlaksana dengan baik dan berdampak positif.

Pihak-pihak dan terlibat dalam kegiatan *crosscutting/colaborative* antara lain:

1. BPMP (Balai Penjaminan Mutu Pendidikan)
 - a. Sebagai fasilitator dan pendamping kebijakan pendidikan di daerah.
 - b. Menyediakan bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi implementasi kebijakan.
 - c. Memberikan rekomendasi peningkatan mutu pendidikan berdasarkan data dan hasil evaluasi.
2. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Provinsi
 - a. Mengkoordinasikan kebijakan pendidikan di tingkat daerah.
 - b. Mengalokasikan sumber daya dan mendukung kebijakan nasional agar berjalan di tingkat lokal.
 - c. Menyusun rencana aksi pendidikan sesuai dengan kebutuhan daerah.
3. Organisasi Pemerintah Daerah (Gubernur/Walikota/Bupati, Sekda, Dukcapil, Disdik, Kemenag, Dinsos, PPPA, BAPPEDA, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, BKKBN, Pokja Bunda PAUD) Merumuskan perencanaan strategis terkait pendidikan dan alokasi anggaran untuk mendukung program prioritas Kemendikbudristek dan melakukan verifikasi ATS, serta Pencegahan stunting untuk mendukung SDM yang berkualitas.
4. Mitra Pembangunan
Organisasi yang mendukung pendanaan, pelatihan, dan pendampingan teknis.

Dampak dari kegiatan *crosscutting/collaborative* yang telah dilakukan antara lain:

1. Meningkatnya Mutu Pendidikan: Adanya peningkatan hasil belajar siswa dan kualitas layanan pendidikan di seluruh wilayah Sumatera Selatan.
2. Pendidikan yang Inklusif dan Berkeadilan: Memastikan seluruh anak, tanpa terkecuali, mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas.
3. Pemerataan Kualitas Layanan Pendidikan: Menekan kesenjangan antarwilayah, baik di perkotaan maupun daerah terpencil.
4. Terwujudnya Komunitas Belajar yang Aktif: Memperkuat ekosistem pendidikan melalui diskusi rutin dan refleksi bersama.

KEGIATAN CROSSCUTTING

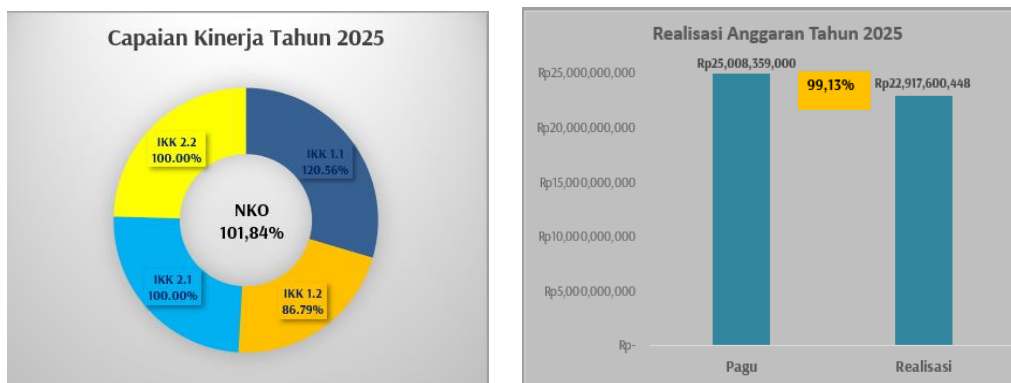


BAB IV | PENUTUP

A. Kesimpulan

BPMP Provinsi Sumatera Selatan telah menyusun laporan kinerja Tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja dan Rencana Strategis BPMP Provinsi Sumatera Selatan.

Berdasarkan data yang diuraikan pada Bab III terkait persentase capaian kinerja fisik dan anggaran BPMP Provinsi Sumatera Selatan dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan persentase capaian kinerja BPMP Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 sebesar 101,84% dan penyerapan anggaran sebesar 99,13%, dengan rincian sebagai berikut:



1. Persentase capaian kinerja sasaran kegiatan 1 “Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen” sebesar 103,67% dengan rincian:
 - ✓ IKK 1.1. Persentase satuan pendidikan yang memanfaatkan hasil asesmen tingkat nasional untuk peningkatan kualitas pembelajaran, capaian kinerja sebesar 120,56%;
 - ✓ IKK 1.2. Persentase daerah (provinsi dan kabupaten/kota) yang memenuhi SPM pendidikan, capaian kinerja sebesar 86,79%.
2. Persentase capaian kinerja fisik sasaran kegiatan “Meningkatnya tata kelola BPMP Provinsi Sumatera Selatan” sebesar 100% dengan rincian:
 - ✓ IKK 2.1. Capaian Nilai Kinerja Anggaran BPMP Provinsi Sumatera Selatan dengan kategori sangat baik, capaian kinerja sebesar 100%;
 - ✓ IKK2.2. Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BPMP Provinsi Sumatera Selatan minimal A, capaian kinerja sebesar 100%.

3. Persentase capaian daya serap anggaran BPMP Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 sebesar 99,13%. Dengan rincian PAGU Rp25.008.359.000 dan realisasi Rp22.917.600.448, dengan blokir anggaran Rp1.889.834.000 dan sisa anggaran Rp200.924.522

B. Kendala dan Tantangan

Dalam pelaksanaan program kerja dan anggaran di BPMP Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 dapat diidentifikasi kendala dan tantangan sebagai berikut:

1. Adanya anomali dan integritas data berupa ketimpangan antara data administratif dengan realitas kualitas, misalnya anomali data pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik) di satuan pendidikan dan ketimpangan data capaian Akreditasi Sekolah dengan validasi yang tersaji dalam Rapor Pendidikan.
2. Kesenjangan kompetensi SDM Digital berupa belum meratanya kemampuan guru dan tenaga kependidikan dalam memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung layanan mutu.
3. Keterbatasan sumber daya sehingga pemenuhan Standar Nasional Pendidikan menjadi sangat terhambat.
4. Kapasitas fiskal dan penurunan Transfer ke Daerah (TKD) berdampak langsung pada perencanaan anggaran pendidikan di daerah yang berkontribusi terhadap alokasi program peningkatan mutu sebagai prioritas utama dibandingkan pembangunan fisik dan beban administratif yang tinggi.
5. Lemahnya sinergi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti penanganan isu Anak Tidak Sekolah (ATS) yang memerlukan data dari Dinas Kependudukan (Disdukcapil) dan intervensi dari Dinas Sosial.
6. Tantangan geografis dan disparitas wilayah, dimana Provinsi Sumatera Selatan memiliki karakteristik wilayah yang luas dengan medan perairan dan pegunungan. Hal ini menyebabkan biaya logistik dan pengawasan untuk menjangkau 17 Kabupaten/Kota menjadi sangat tinggi, sehingga intervensi mutu tidak selalu merata.
7. Masih terbatasnya sinergi dengan mitra eksternal (NGO, Perguruan Tinggi, dan Sektor Swasta) untuk ikut serta dalam pendampingan satuan pendidikan. Beban pendampingan saat ini masih sangat bertumpu pada personil BPMP dan Pengawas Sekolah yang jumlahnya terbatas.

8. Perubahan regulasi yang dinamis terkait penjaminan mutu seringkali memerlukan waktu sosialisasi yang lama hingga ke tingkat satuan pendidikan, menyebabkan jeda (gap) dalam implementasi kebijakan di lapangan.

Langkah Kerja Ke Depan

Seiring dengan selesainya periode Rencana Strategi (Renstra) Tahun 2020-2024, dapat dikatakan bahwa BPMP Provinsi Sumatera Selatan telah melaksanakan program kegiatan berdasarkan target/sasaran kegiatan yang ditetapkan dengan optimal.

Langkah kerja ke depan yang dilaksanakan BPMP Provinsi Sumatera Selatan dalam upaya pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut.

1. Meningkatkan peran dalam melakukan fasilitasi, pendampingan, dan monitoring serta evaluasi kepada pemerintah daerah dan satuan pendidikan dalam pelaksanaan program prioritas Kemendikdasmen.
2. Melakukan strategi penguatan tata kelola data melalui layanan konsultasi intensif (daring maupun luring) bagi operator sekolah dan kepala sekolah untuk melakukan validasi silang (*cross-check*) data Dapodik.
3. Melakukan verifikasi lapangan pada sampel sekolah yang menunjukkan anomali data yang ekstrem (misalnya, nilai sarpras tinggi namun kondisi fisik rusak) guna memastikan akurasi data administratif dan data faktual.
4. Menyelenggarakan pertemuan rutin dengan Bagian Perencanaan Dinas Pendidikan, Bappeda dan BPKAD untuk menyajikan profil pendidikan daerah dan memastikan indikator SPM masuk ke dalam Dokumen Perencanaan Daerah (RPJMD, Renstra, RKPD dan Renja).
5. Menginisiasi forum koordinasi yang melibatkan Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, dan Disdukcapil untuk penanganan isu spesifik seperti Anak Tidak Sekolah (ATS), Stunting, dan PAUD-HI yang menjadi salah satu indikator utama SPM.
6. Optimalisasi Pendamping Satuan Pendidikan sebagai "Co-Fasilitator" yang dilatih secara khusus untuk menjadi mitra operasional BPMP dalam mengawal kebijakan prioritas di tingkat satuan pendidikan.
7. Mengembangkan sistem informasi internal yang dapat memantau progres pemenuhan SNP dan SPM di seluruh wilayah Sumsel, misalnya melalui Dasbor Lintasan Musi dan Dasbor Kualitas Dapodik Provinsi Sumatera Selatan, yang juga dimanfaatkan seluruh pemangku kepentingan.

8. Penguatan peran dan *product knowledge* pegawai BPMP Provinsi Sumatera Selatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan memahami Kebijakan program prioritas Kemendikdasmen.
9. Melakukan identifikasi Fasilitasi, pendampingan, dan monitoring serta evaluasi kepada pemerintah daerah dan satuan pendidikan dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
10. Memperkuat tata kelola organisasi melalui implementasi Reformasi Birokrasi melalui Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi.
11. Menerapkan budaya kerja organisasi yang RAMAH (Responsif, Akuntabel, Melayani, Adaptif, dan Harmonis) dan SANTUN (Setia, Amanah, Negarawan, Teladan, Unggul, dan Ngemong) melalui peningkatan kapasitas SDM.



PERNYATAAN TELAH DIREVIU

BPMP PROVINSI SUMATERA SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja BPMP Provinsi Sumatera Selatan untuk tahun anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam laporan kinerja menjadi tanggung jawab manajemen BPMP Provinsi Sumatera Selatan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

BPMP Provinsi Sumatera Selatan
Indralaya, 30 Januari 2026

Yulidar, SE, MM
NIP. 197307072001122001

KERTAS KERJA

REVIU LAPORAN KINERJA

BPMP PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025

No	Pernyataan	Checklist
I	Format Laporan Lakin	
1	Laporan kinerja telah menyajikan data penting unit kerja	V
2	Laporan kinerja telah menyajikan informasi target kinerja	V
3	Laporan kinerja telah menyajikan capaian kinerja yang memadai	V
4	Telah menyajikan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	V
5	Telah menyajikan upaya perbaikan kedepan	V
6	Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	V
II	Mekanisme Penyusunan Laporan	
1	Laporan kinerja disusun oleh tim yang bentuk atau unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi menyusun laporan kinerja	V
2	Informasi yang disampaikan dalam laporan kinerja telah didukung dengan data yang memadai	V
3	Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke tim/unit penyusunan laporan kinerja	V
4	Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpul data/informasi disetiap unit kerja	V
5	Data/informasi yang disampaikan dalam laporan kinerja telah diyakini keandalannya	V
6	Analisis/Penjelasan dalam laporan kinerja telah diketahui oleh unit kerja terkait	V
7	Laporan kinerja triwulan merupakan gabungan partisipasi dari bawahannya	V
III	Substansi Laporan	
1	Sasaran dalam laporan kinerja telah sesuai dengan sasaran dalam perjanjian kinerja	V
2	Sasaran dalam laporan kinerja telah selaras dengan rencana strategis	V
3	Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	V
4	IKSS/IKP/IKK dalam laporan kinerja telah disesuaikan dengan IKSS/IKP/IKK dalam perjanjian kinerja	V
5	Jika butir 4 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	V
6	Telah terdapat perbandingan data kinerja baik dengan tahun berjalan, dengan tahun lalu, tahun -tahun sebelumnya dan target akhir renstra	V
7	Terdapat uraian analisis kinerja (program/kegiatan pendukung pencapaian indikator kinerja/hambatan dan kendala/langkah antisipasi) pada setiap indikator kinerja :	V
8	Terdapat uraian tingkat pencapaian sasaran sampai dengan tahun berjalan ;	V
9	IKSS/IKP/IKK telah cukup mengukur sasaran ;	V
10	IKSS/IKP/IKK telah SMART	V



Perjanjian Kinerja Tahun 2025
Kapala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan
Provinsi Sumatera Selatan
Dengan
Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini,
Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Aria Ahmad Mangunwibawa, S.Psi., M.Si.

Jabatan : Kapala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan
untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**


Nama : Gogot Suharwoto, S.Pd., M.Ed., Ph.D.


Jabatan : Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian Kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Inderalaya, 29 Juli 2025

 Ditandatangani secara elektronik oleh
Direktur Jenderal Pendidikan Anak
Usia Dini, Pendidikan Dasar dan
Pendidikan Menengah
Gogot Suharwoto, S.Pd., M.Ed., Ph.D.

 Ditandatangani secara elektronik oleh
Kapala Balai Penjaminan Mutu
Pendidikan Provinsi Sumatera
Selatan
Aria Ahmad Mangunwibawa, S.Psi.,
M.Si.




Catatan :


- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Sasaran	Indikator	Satuan	Target
[SK 1] Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas dan Dikmen	[IKK 1.1] Persentase satuan pendidikan yang memanfaatkan hasil asesmen tingkat nasional untuk peningkatan kualitas pembelajaran	Persen	64,06
	[IKK 1.2] Persentase daerah (provinsi dan kabupaten/kota) yang memenuhi SPM pendidikan	Persen	57,61
[SK 2] Meningkatnya tata kelola BPMP Provinsi Sumatera Selatan	[IKK 2.1] Capaian Nilai Kinerja Anggaran BPMP Provinsi Sumatera Selatan dengan kategori sangat baik	Kategori	Sangat Baik
	[IKK 2.2] Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BPMP Provinsi Sumatera Selatan minimal A	Predikat	A

No	Kode	Nama Kegiatan	Anggaran
1	7605	Layanan Penjaminan Mutu Pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, Dikmen dan Dikmas	Rp13.302.772.000
2	7606	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	Rp17.773.757.000
Total Anggaran			Rp31.076.529.000


 Ditandatangani secara elektronik oleh
 Direktur Jenderal Pendidikan Anak
 Usia Dini, Pendidikan Dasar dan
 Pendidikan Menengah
 Gogot Suharwoto, S.Pd., M.Ed., Ph.D.

Inderalaya, 29 Juli 2025


 Ditandatangani secara elektronik oleh
 Kepala Balai Penjaminan Mutu
 Pendidikan Provinsi Sumatera
 Selatan
 Aria Ahmad Mangunwibawa, S.Psi.,
 M.Si.



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



Perjanjian Kinerja Revisi Tahun 2025
Kapala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan
Dengan
Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan
Pendidikan Menengah

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Tajuddin Idris, S.Si, MT

Jabatan : Kapala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan
untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**


Nama : Gogot Suharwoto, S.Pd., M.Ed., Ph.D.


Jabatan : Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian Kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Inderalaya, 11 Desember 2025

 Ditandatangani secara elektronik oleh
Direktur Jenderal Pendidikan Anak
Usia Dini, Pendidikan Dasar dan
Pendidikan Menengah
Gogot Suharwoto, S.Pd., M.Ed., Ph.D.

 Ditandatangani secara elektronik oleh
Kapala Balai Penjaminan Mutu
Pendidikan Provinsi Sumatera
Selatan
Tajuddin Idris, S.Si, MT




Catatan :


- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Sasaran	Indikator	Satuan	Target
[SK 1] Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas dan Dikmen	[IKK 1.1] Persentase satuan pendidikan yang memanfaatkan hasil asesmen tingkat nasional untuk peningkatan kualitas pembelajaran	Persen	64,06
	[IKK 1.2] Persentase daerah (provinsi dan kabupaten/kota) yang memenuhi SPM pendidikan	Persen	57,61
[SK 2] Meningkatnya tata kelola BPMP Provinsi Sumatera Selatan	[IKK 2.1] Capaian Nilai Kinerja Anggaran BPMP Provinsi Sumatera Selatan dengan kategori sangat baik	Kategori	Sangat Baik
	[IKK 2.2] Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BPMP Provinsi Sumatera Selatan minimal A	Predikat	A

No	Kode	Nama Kegiatan	Anggaran
1	7605	Layanan Penjaminan Mutu Pendidikan jenjang PAUD Dikdas Dikmen dan Dikmas	Rp7.228.885.000
2	7606	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PAUD Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	Rp17.779.474.000
Total Anggaran			Rp25.008.359.000


 Ditandatangani secara elektronik oleh
 Direktur Jenderal Pendidikan Anak
 Usia Dini, Pendidikan Dasar dan
 Pendidikan Menengah
 Gogot Suharwoto, S.Pd., M.Ed., Ph.D.

Inderalaya, 11 Desember 2025


 Ditandatangani secara elektronik oleh
 Kepala Balai Penjaminan Mutu
 Pendidikan Provinsi Sumatera
 Selatan
 Tajuddin Idris, S.Si, MT



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Penjaminan Mutu Pendidikan
Provinsi Sumatera Selatan**

Jln. Lintas Timur Km. 36 Indralaya
Kabupaten Ogan Ilir
Sumatera Selatan
Telp. (0711) 581368 Fax. (0711) 581518



BPMP Provinsi Sumatera Selatan



bpmpsumsel.kemdikbud.go.id



@bpmp.provsumsel